



**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK TAHUN 2026**



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

KATA PENGANTAR

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, karena berkat rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) 2025 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2026

RENJA Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2026 merupakan kesinambungan gerak dan langkah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mewujudkan Visi, Misi dan Sasaran yang telah dituangkan dalam RENSTRA Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. RENJA Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 merupakan

Dengan adanya RENJA Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga ini, diharapkan seluruh bidang dan pihak-pihak terkait lainnya memiliki pedoman atau acuan untuk merencanakan program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan APBD dan APBN maupun sumber pendanaan lainnya. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak menyumbangkan pemikirannya dan tenaga dalam menyusun RENJA Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2026. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kemajuan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna mencapai taraf hidup masyarakat yang lebih layak dan terkendaliannya laju pertumbuhan penduduk serta mengurangnya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Purbalingga secara optimal.

Purbalingga, Desember 2024
Plt. Kepala DINSOSDALDUKKBP3A
Kabupaten Purbalingga
Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesra

AGUNG WIDIARTO, SE.M.Si

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	3
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	42
2.3. Isu – Isu Penting tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	49
2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPD.....	50
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	91

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	85
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga.....	87
3.3. Program dan Kegiatan.....	87

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

Tabel 1.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah	13
Tabel 1.2 Rencana Strategis DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026.....	42
Tabel 1.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	43
Tabel 1.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD Tahun 2026.....	51
Tabel 1.5 Hubungan Antara Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Daerah.....	86
Tabel 1.6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	88
Tabel 1.7 Rencana Kerja dan Pendanaan.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan dari setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang dapat digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang lebih terarah.

Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja DINSOSDALDUKKBP3A merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) DINSOSDALDUKKBP3A. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28

tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Rencana Kerja Perangkat daerah (Renja PD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 223 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara dan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi

Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga;

14. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021 – 2026;

16. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD adalah untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2026 bagi seluruh aparatur lingkup Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga guna mewujudkan tujuan yang diharapkan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2024 adalah untuk mempertajam prioritas program dan kegiatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut.

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjelaskan tentang pengertian secara ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat daerah serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan, perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat daerah.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat daerah, serta susunan garis besar dari isi dokumen.

BAB II. Hasil Evaluasi Renja PD Tahun Lalu (Tahun 2024)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja perangkat daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah

ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Memuat uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis terkait dengan pelayanan perangkat daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional dan internasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah;
5. Formulasi isu –isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD

Memuat uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan dengan membandingkan antara rencana awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rencana awal RKPD.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai:

1. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;
3. Penjelasan apabila rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rencana awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatof, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP.

Berisi uraian penutup tentang :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, terkait pelaksanaan dan ketersediaan anggaran dengan kebutuhan;
- b. Kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut,.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

(TAHUN 2024)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD.

Tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value of Money*, penggunaan konsep tersebut memerlukan indikator-indikator sebagai berikut;

- a. Indikator masukan (Input) untuk mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (Dana), SDM, Peralatan, Material dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis kesesuaian alokasi sumberdaya yang dimiliki dengan rencana strategis yang ditetapkan.

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

- b. Indikator Keluaran (*Output*) merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun non fisik.
- c. Indikator Hasil (*Outcome*) merupakan indikator yang menunjukkan telah tercapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka panjang.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan renja DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

Tabel.1.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra

Urusan/Bidang, Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran OPD	100	100	100	100	100	100	100	100 %
	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %
Perencanaan, Penganggaran, dan	Prosentase sub kegiatan dalam	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen perencanaan yang dilaksanakan dan Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 %	2 dokumen	2 dokumen	100 %
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPJ, LKjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100 %	6 dokumen	6 dokumen	100 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan penunjang operasional kantor yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	35 ASN	35 ASN	35 ASN	35 ASN	100 %	35 ASN	35 ASN	100 %
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam) Tersedianya jamuan tamu dan rapat	250 ok	250 ok	250 ok	250 ok	100 %		250 ok	100 %
Koordinasi dan pelaksanaan akuntan SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12bln	12bln	12bln	12bln	100%		12bln	100%

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin dan Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Peingkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	JumlahASN yang terfasilitasi	35orang	35orang	35orang	35orang	100 %	35orang	35orang	100 %
Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase ketersediaan laporan daftar inventaris barang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penatausahaan barangmilik daerah Pada SKPD	Jumlah Bulan ASN yang menerima honor pejabat pengadaan, PPHP, PPKom, pengurus barang	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum penunjang operasional kantor yang terlaksanakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah perlengkapan listrik yang tersedia	9 Jenis Unit/buah	9 Jenis Unit/buah	9 Jenis Unit/buah	9 Jenis Unit/buah	100 %	9 Jenis Unit/buah	9 Jenis Unit/buah	100 %
Fasilitasi Kunjungan tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi	259 orang	259 orang	259 orang	259 orang	100%	259 orang	259 orang	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar/Majalah	30 eksemplar /bulan	30 eksemplar/ bulan	30 eksemplar/ bulan	30 eksemplar /bulan	100 %	30 eksemplar /bulan	30 eksemplar/ bulan	100 %
Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah bulan pegawai yang terfasilitasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jamuan tamu dan rapat yang tersedia	275 ok	275 ok	275 ok	275 ok	100 %	275 ok	275 ok	100 %
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tereedia	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100 %	5 jenis	5 Jenis	100 %
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis unit/bulan	5 jenis unit/bulan	5 jenis unit/bulan	5 jenis unit/bulan	100 %	5 jenis unit/bulan	5 jenis unit/bulan	100 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyuruat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan untuk membayar Honor Petugas	2 ob	2 ob	2 ob	2 ob	100 %	2 ob	2 ob	100 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas/prasional dinas/lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	82 unit	82 unit	82 unit	82 unit	100%	82 unit	82 unit	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja yang tersedia	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	100 %	12 jenis	12 jenis	100 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor (pengecatan,dll) yang terpelihara	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100 %	1 unit	1 unit	100 %
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan potensi sumber kesejahteraan sosial yang terlibat dalam penanganan masalah sosial	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PSKS yang dibina	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga	Jumlah TKSK yang dibina	1195 ok	1195 ok	1195 ok	1195 ok	100 %	1195 ok	1195 ok	100 %

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota									
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	- Jumlah lembaga PSKS yang mendapatkan fasilitas Karangtaruna, Panti Wreda/Panti Asuhan, PPDI	18 org	18 org	18 org	18 org	100 %	18 org	18 org	100 %
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang dibina	811 lembaga	811 lembaga	811 lembaga	811 lembaga	100 %	811 lembaga	811 lembaga	100 %
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	jumlah Kelembagaan LK3 yang di fasilitasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Yang Terlayani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan	Cakupan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

NAPZA di Luar Panti Sosial	Pengemis di Luar Panti Sosial								
Penyediaan Permakanan	Jumlah Permakanan SOSH berupa bahan makanan untuk PMKS di dalam rumah singgah	10 org	10 org	10 org	10 org	100 %	10 org	10 org	100 %
Penyediaan Sandang	Jumlah kebutuhan dasar berupa sandang untuk kegiatan di rumah singgah	10 org	10 org	10 org	10 org	100 %	10 org	10 org	100 %
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah alat bantu untuk penyandang disabilitas dalam melaksanakan fungsi sosialnya Jumlah alat bantu untuk penyandang disabilitas dalam melaksanakan fungsi sosialnya	10 org	10 org	10 org	10 org	100 %	10 org	10 org	100 %
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah PMKS yang mendapatkan layanan pengaduan	10 org	10 org	10 org	10 org	100 %	10 org	10 org	100 %
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial di rumah singgah	10 org	10 org	10 org	10 org	100 %	10 org	10 org	100 %
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan usaha ekonomi produktif	6 org	6 org	6 org	6 org	100 %	6 org	6 org	100 %

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

Korban HIV/AIDS dan NAPZA									
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PMKS di rumah singgah yang mendapatkan layanan kedaruratan Jumlah PMKS yang mendapatkan layanan kedaruratan	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	100 %	10 orang	10 orang	100 %
Pemberian Pelayanan reunifikasi Keluarga	Jumlah PMKS yang direunifikasi keluarga	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	100 %	10 orang	10 orang	100 %
Pemberian Pelayanan penelusuran Keluarga	Jumlah PMKS di rumah singgah yang dipulangkan ke keluarganya	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	100 %	10 orang	10 orang	100 %
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PMKS di rumah singgah yang mendapatkan fasilitasi layanan rujukan	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	100 %	10 orang	10 orang	100 %
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL									
	Persentase DTKS Tervalidasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk miskin yang didata	139014 RT	139014 RT	139014 RT	139014 RT	100 %	139014 RT	139014 RT	100 %
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah penduduk miskin yang mendapatkan fasilitas	55577 org	55577 org	55577 org	55577 org	100 %	55577 org	55577 org	100 %

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	program PKH, KUBE, BPNT, KJS dan RTLH								
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Cakupan korban bencana menerima bantuan	100%	100%	100%	100%	100%	18 Kec	100%	100 %
Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan makanan	18 Kec	18 Kec	18 Kec	18 Kec	100%	10%	18 Kec	100 %
Penyediaan tempat penampungan pengungsian	Jumlah tempat penampungan pengungsian yang ada	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan kampung siaga	10%	10%	10%	10%	100%	40 org	10%	100 %
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana	40 org	40 org	40 org	40 org	100%	100%	40 org	100 %
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan TMP yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	1 TMP 5 Lokasi	100%	100 %
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan yang dirawat Jumlah taman makam pahlawan yang dirawat	1 TMP 5 Lokasi	1 TMP 5 Lokasi	1 TMP 5 Lokasi	1 TMP 5 Lokasi	100%	18 Kec	1 TMP 5 Lokasi	100 %
Rehabilitasi sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Tingkat partisipasi perempuan di lembaga politik	15 org	15 org	15 org	15 org	100%	15 org	15 org	100 %

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kelembagaan PUG yang aktif di OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Rakor Pokja PUG dan Tim Driver PUG	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	100%	4 kali	4 kali	100 %
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan organisasi wanita yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Pembinaan Keluarga melalui organisasi wanita	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100 %
Sosialisasipeningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah sosialisasi pendidikan politik bagi perempuan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100 %
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	Cakupan lembaga penyedia layanan pemberdayaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	perempuan yang dibina								
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kader yang mengikuti pelatihan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	60 org	60 org	60 org	60 org	100%	60 org	60 org	100 %
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan thd perempuan yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
Koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan lingkup daerah kabupaten kota	Jumlah kegiatan yang di laksanakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rakor PPT Tercukupinya Honor PPT Harapan	1 kali 45 org	1 kali 45 org	1 kali 45 org	1 kali 45 org	100%	1 kali 45 org	1 kali 45 org	100 %
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bantuan sembako bagi perempuan korban kekerasan	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	100%	8 paket	8 paket	100 %
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi Perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten kota	Jumlah layanan yang di berikan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	100%
Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan Perempuan	Persentase korban kekerasan perempuan yang tertangani	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

Tingkat daerah kabupaten kota									
Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah kegiatan yang di laksanakan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	100%
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rekomendasi yang ditindaklanjuti	5 rekomendasi	5 rekomendasi	5 rekomendasi	5 rekomendasi	100%	5 rekomendasi	5 rekomendasi	100 %
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Profil Gender dan Profil Anak	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100 %
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data Gender dan Anak yang di susun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100 %
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan desa/kelurahan layak anak	70%	70%	70%	70%	100%	70%	70%	100 %

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelebagaan PHA yang difasilitasi	20 lembaga	20 lembaga	20 lembaga	20 lembaga	100%	20 lembaga	20 lembaga	100 %
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah event hari anak nasional yang diselenggarakan	1 event	1 event	1 event	1 event	100%	1 event	1 event	100 %
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rakor yang dilaksanakan dan desa/kelurahan layak anak yang dibentuk Jumlah rakor yang dilaksanakan dan desa/kelurahan layak anak yang dibentuk	5 desa/kelurahan, 6 rakor	5 desa/kelurahan, 6 rakor	5 desa/kelurahan, 6 rakor	5 desa/kelurahan, 6 rakor	100%	5 desa/kelurahan, 6 rakor	5 desa/kelurahan, 6 rakor	100 %
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup anak yang berkembang	20 lembaga	20 lembaga	20 lembaga	20 lembaga	100%	20 lembaga	20 lembaga	100 %
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah kegiatan forum anak tingkat kabupaten yang dilaksanakan	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	100%	5 kali	5 kali	100 %

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah stiker dan pamflet Jumlah stiker dan pamphlet	300 pamflet, 300 stiker	300 pamflet, 300 stiker	300 pamflet, 300 stiker	300 pamflet, 300 stiker	100%	300 pamflet, 300 stiker	300 pamflet, 300 stiker	100 %
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan KHA bagi kepala sekolah SD/MI, Forum Anak, Forum Lintas Perempuan dan Orma	80 peserta	80 peserta	80 peserta	80 peserta	100%	80 peserta	80 peserta	100 %
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak yang mendapatkan perlindungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat penurunan kekerasan terhadap anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak berbasis sekolah Jumlah peserta sosialisasi pencegahan	5 sekolah, 1200 siswa	5 sekolah, 1200 siswa	5 sekolah, 1200 siswa	5 sekolah, 1200 siswa	100%	5 sekolah, 1200 siswa	5 sekolah, 1200 siswa	100 %

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

Kewenangan Kabupaten/Kota	kekerasan terhadap anak berbasis sekolah								
P enyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus pengaduan anak korban kekerasan yang ditindaklanjuti	50 kasus	50 kasus	50 kasus	50 kasus	100%	50 kasus	50 kasus	100 %
Koordinasi pelaksanaan layanan AMPK	Jumlah kegiatan yang di laksanakan	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali	100%
Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat daerah kabupaten kota	Persentase lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan kapasitas SDM Lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan yang di laksanakan								

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Tingkat penurunan laju pertumbuhan penduduk	<1 persen	<1 persen	<1 persen	<1 persen	100%	<1 persen	<1 persen	100 %
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase kebijakan yang mendukung pengendalian kuantitas penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	1 kali	100 %
Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Kegiatan Evaluasi program Bangga Kencana yang dilaksanakan	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	100%	4 kali	4 kali	100 %
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan wilayah yang terpetakan dalam profil kependudukan dan KB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Cetak Buku Profil Kependudukan dan Keluarga Berencana Tersusunnya Profil Kependudukan dan Keluarga Berencana	30 buku, 1 dokumen	30 buku, 1 dokumen	30 buku, 1 dokumen	30 buku, 1 dokumen	100%	30 buku, 1 dokumen	30 buku, 1 dokumen	100 %
Pemetaan Kependudukan	Jumlah monitoring evaluasi Sistem dan Informasi Keluarga yang terlaksana	18 kec	18 kec	18 kec	18 kec	100%	18 kec	18 kec	100 %
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah monitoring evaluasi Sistem dan Informasi Keluarga yang dilaksanakan	18 kec	18 kec	18 kec	18 kec	100%	18 kec	18 kec	100 %
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Profil Kependudukan dan Keluarga Berencana yang di susun.	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100 %
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need KB)	9 persen	9 persen	9 persen	9 persen	100%	9 persen	9 persen	100 %
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya advokasi KIE pengendalian penduduk dan KB	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100 %

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah stakeholders dan mitra kerja yang mengikuti sosialisasi program KKBPK Jumlah stakeholders dan mitra kerja yang mengikuti sosialisasi program KKBPK	18 kec, 239 desa/kel.	18 kec, 239 desa/kel.	18 kec, 239 desa/kel.	18 kec, 239 desa/kel.	100%	18 kec, 239 desa/kel.	18 kec, 239 desa/kel.	100 %
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah KIE yang dilaksanakan di wilayah	10 lokasi	10 lokasi	10 lokasi	10 lokasi	100%	10 lokasi	10 lokasi	100 %
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah media KIE yang dibuat dan di distribusikan	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	4 jenis	100 %
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah media promosi KIE yang digunakan	3 media	3 media	3 media	3 media	100%	3 media	3 media	100 %
Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah Kegiatan Harganas yang dilaksanakan	1 event	1 event	1 event	1 event	100%	1 event	1 event	100 %
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah balai penyuluh yang difasilitasi pengelolaan dan pemeliharaannya	18 balai penyuluh	18 balai penyuluh	18 balai penyuluh	18 balai penyuluh	100%	18 balai penyuluh	18 balai penyuluh	100 %

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase tenaga penyuluh KB yang diperdagakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader IMP yang difasilitasi kegiatan KIE Bangsa Kencana	239 PPKBD	239 PPKBD	239 PPKBD	239 PPKBD		239 PPKBD	239 PPKBD	239 PPKBD
	Jumlah kader IMP yang difasilitasi kegiatan KIE Bangsa Kencana	1569 Sub PPKBD	1569 Sub PPKBD	1569 Sub PPKBD	1569 Sub PPKBD		1569 Sub PPKBD	1569 Sub PPKBD	1569 Sub PPKBD
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ke wilayah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah faskes, akseptor MOW dan akseptor MOP yang difasilitasi alat dan obat kontrasepsi	42 faskes	42 faskes	42 faskes	42 faskes	100%	42 faskes	42 faskes	100 %
Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah peserta KB yang mengalami komplikasi dan kegagalan MKJP yang difasilitasi	10 org	10 org	10 org	10 org	100%	10 org	10 org	100 %
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB	5 kec, 14 PKB	5 kec, 14 PKB	5 kec, 14 PKB	5 kec, 14 PKB	100%	5 kec, 14 PKB	5 kec, 14 PKB	100 %

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB								
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah penduduk usia subur yang mengikuti pembinaan KB dan KR	1512 org	1512 org	1512 org	1512 org	100%	1512 org	1512 org	100 %
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase mitra kerja yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	60%	60%	60%	60%	100%	60%	60%	100 %
Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah mitra kerja yang berperan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	5 mitra	5 mitra	5 mitra	5 mitra	100%	5 mitra	5 mitra	100 %
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang dikelola melalui program KKBPK	36 Kampung KB	36 Kampung KB	36 Kampung KB	36 Kampung KB	100%	36 Kampung KB	36 Kampung KB	100 %
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN	Cakupan keluarga mengikuti UPPKS	13.61 Persen	13.61 Persen	13.61 Persen	13.61 Persen	13.61 Persen	13.61 Persen	13.61 Persen	100 %

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

KELAURGA SEJAHTERA (KS)									
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tingkat keluarga sejahtera	100%	36 Kampung KB	36 Kampung KB	36 Kampung KB	100%	36 Kampung KB	36 Kampung KB	100 %
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPMKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPMKS)	Jumlah Kader yang mengikuti pelatihan	30 desa	36 Kampung KB	36 Kampung KB	36 Kampung KB	100%	36 Kampung KB	36 Kampung KB	100 %
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPMKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPMKS)	Jumlah Kader yang mengikuti pelatihan Jumlah Kader yang mengikuti pelatihan	18 kec, 180 kader	36 Kampung KB	36 Kampung KB	36 Kampung KB	100%	36 Kampung KB	36 Kampung KB	100 %
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta	Jumlah Kader yang mengikuti pelatihan Jumlah Orang tua yang mengikuti Sosialisasi Program Orang Tua Hebat dan Siswa yang mengikuti sosialisasi Genre	18 kec, 540 org	36 Kampung KB	36 Kampung KB	36 Kampung KB	100%	36 Kampung KB	36 Kampung KB	100 %

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Orang tua yang mengikuti Sosialisasi Program Orang Tua Hebat dan Siswa yang mengikuti sosialisasi Genre								
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	60%	60%	60%	60%	100%	60%	60%	100 %
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Mitra yang mengikuti sosialisasi Program Genre	50 remaja PBG	50 remaja PBG	50 remaja PBG	50 remaja PBG	100%	50 remaja PBG	50 remaja PBG	100 %
Pemantauan data dan informasi Kelaurga berresiko stunting (termasuk remaja clon pengantin/Calon PUS,Ibu hamil,Pasca persalinan/kelahiran,baduta/ba lita)	Jumlah Data dan informasi keluarga beresiko stunting yang di himpun oleh Balai Penyuluhan KB	18 Kec	18 Kec	18 Kec	18 Kec	100%	18 Kec	18 Kec	100%
Pendampingan keluarga beresiko stunting (termasuk remaja clon pengantin/Calon PUS,Ibu hamil,Pasca	Jumlah Tim Pendamping Keluarga yang ada di kab.purbaingga	2307 orang	2307 orang	2307 orang	2307 orang	100%	2307 orang	2307 orang	100%

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

persalinan/kelahiran,baduta/balita)									
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja DINSOSDALDUKKBP3A Tahun 2025 disampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Urusan sosial (Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Pemberdayaan sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.)
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Kinerja Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang di tindak lanjuti dan Tingkat Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD memiliki target akhir Renstra tahun 2021 - 2026 sebesar 100 % dengan target dan realisasi renja di tahun 2024 sebesar 100%. Pada tahun 2025 target renja sebesar 100 % dengan perkiraan realisasi sebesar 100 % pada realisasi capaian tahun berjalan 2025 dengan tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 100 %.
 - b. Program Pemberdayaan sosial dengan Indikator Kinerja Cakupan potensi sumber kesejahteraan sosial yang terlibat dalam penanganan masalah sosial pada tahun 2024 memiliki target sebesar 100 % dengan realisasi renja di tahun 2024 sebesar 100%. Pada tahun 2025 target renja sebesar 100 % dengan perkiraan realisasi sebesar 100 % pada realisasi capaian tahun berjalan 2025 dengan tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 100 %.
 - c. Program Penanganan Bencana dengan Indikator Kinerja persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap

darurat pada tahun 2024 memiliki target sebesar 100 % dengan realisasi renja di tahun 2024 sebesar 100%. Pada tahun 2025 target renja sebesar 100 % dengan perkiraan realisasi sebesar 100 % pada realisasi capaian tahun berjalan 2025 dengan tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 100 %.

- d. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan Indikator Kinerja Persentase TMP dan Makam leluhur yang di fasilitasi pengelolaannya memiliki target sebesar 5 lokasi dengan target dan realisasi renja di tahun 2024 sebesar 100%. Pada tahun 2025 target renja sebesar 5 lokasi dengan perkiraan realisasi sebesar 100 % pada realisasi capaian tahun berjalan 2025 dengan tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 100 %.
- e. Program Perlindungan Jaminan Sosial dengan Indokator Kinerja Prosentase fakir miskin mendapat penanganan sosial memiliki target sebesar 85.87 % dengan realisasi sebesar 85.87% di tahun 2024 sebesar. Pada tahun 2025 target renja sebesar 86.87 % dengan perkiraan realisasi sebesar 100 % pada realisasi capaian tahun berjalan 2025 dengan tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 100 %.
- f. Program Rehabilitasi Sosial dengan Indikator Kinerja Persentase penyandang disabilitasterlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantargelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti pada tahun 2024 memiliki target kinerja sebesar 42.25 % dengan realisasi sebesar 42.25%. Pada tahun 2025 target renja sebesar 45.36 % dengan perkiraan realisasi sebesar 45.36 % pada realisasi

capaian tahun berjalan 2025 dengan tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 100 %.

2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana KB, Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera KS)
 - a. Program Pengendalian Penduduk dengan Indikator Kinerja Persentase ketersediaan dokumen kebijakan pengendalian penduduk. Pada tahun 2024 memiliki target sebesar 100 %. dengan realisasi sebesar 100 %. Pada tahun 2025 target renja sebesar 100 % dengan perkiraan realisasi sebesar 100 % pada realisasi capaian tahun berjalan 2025 dengan tingkat capaian realisasi target sebesar 100 %.
 - b. Program Pembinaan Keluarga Berencana KB dengan Indikator Kinerja Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need KB) dan Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) pada tahun 2024 memiliki target sebesar 9.75% dan 33%.. dengan realisasi sebesar 9.75% dan 33%.. Pada tahun 2025 target renja sebesar 9.75% dan 33.70% dengan perkiraan realisasi masing-masing sebesar 9.75% dan 33.70%. pada capaian tahun berjalan 2025 dengan tingkat capaian sebesar 100 %
 - c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera KS dengan Indikator Kinerja Cakupan Keluarga yang mengikuti kelompok UPPKS dan Cakupan anggota Bina Keluarga Balita(BKB, BKR, BKL, ber-KB) Pada tahun 2024 memiliki target sebesar 10.32% dan 82.15%. dengan

realisasi sebesar 10.32% dan 82.15%. Pada tahun 2025 target renja sebesar 10.34 % dan 83.77%, dengan perkiraan realisasi sebesar 10.34% dan 83.77%. pada capaian tahun berjalan 2025 dengan tingkat capaian sebesar 100 %.

3. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Program Pemenuhan Hak, Anak, Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Program Perlindungan Khusus Anak, Program Perlindungan Perempuan).
- a. Program Pemenuhan Hak Anak PHA dengan Indikator Kinerja Cakupan Desa/Kelurahan Layak Anak, Pada tahun 2024 memiliki target renja sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%. Pada tahun 2025 target renja sebesar 100% dengan perkiraan realisasi sebesar 100%., pada capaian tahun berjalan 2025 dengan tingkat capaian sebesar 100%.
- b. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan Indikator Kinerja Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif, perempuan sebagai pengambil keputusan di OPD dan Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan rumah tangga, pada tahun 2024 memiliki target sebesar 13.95 % dan 30.35 dengan realisasi sebesar 13.95% dan 30.35%. Pada tahun 2025 target renja sebesar 14.02% dan 30.43% dengan perkiraan realisasi sebesar 14.02% dan 30.43%. pada capaian tahun berjalan 2025 dengan tingkat capaian target Renstra sebesar 100%.

- c. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dengan Indikator Persentase data gender dan anak yang tersedia, pada tahun 2024 memiliki target sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%. Pada tahun 2025 target renja sebesar 100% dengan perkiraan realisasi sebesar 100 % pada realisasi tahun berjalan 2025 dengan tingkat capaian target sebesar 100 %.
- d. Program Perlindungan Khusus Anak dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan persentase anak yang menjadi korban kekerasan yang tertangani, pada tahun 2024 memiliki target kinerja sebesar 22.46 % dan 100%, dengan realisasi sebesar 22.46% dan 100%. Pada tahun 2025 target sebesar 26.49% dan 100% dengan perkiraan realisasi sebesar 26.49% dan 100 %. pada realisasi tahun berjalan 2024 dengan tingkat capaian sebesar 26.49% dan 100 %.
- e. Program Perlindungan Perempuan dengan Indikator Kinerja yaitu Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPO(Per 100.000 Penduduk Perempuan), Pada tahun 2024 memiliki target kinerja sebesar 2.64%. Pada tahun 2025 memiliki target kinerja sebesar 2.43% dengan perkiraan realisasi sebesar 2.43 % .pada realisasi tahun berjalan 2025 dengan tingkat capaian sebesar 100 %.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Sesuai dengan Dokumen Renstra DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026 yang telah disusun dan dilakukan review pada tahun 2021 maka hubungan antara tujuan, sasaran serta indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel. 1.2 Rencana Strategis DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Indikator Sasaran				
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Perlindungan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial		Cakupan PPKS yang mendapat program pemerintah	80.50	82.30	84.03	85.70	87.50
		Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Cakupan KPM Gradusi Sejahtera Mandiri	10	10	10	10	10
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan DINSOSDALDUKKBP 3A		Nilai Kematangan DINSOSDALDUKKBP3A	38	39	40	41	42
		Meningkatnya Implementasi SAKIP dinsosdaldukkbp3a	Nilai SAKIP DINSOSDALDUKKBP3A	68.92	69.42	69.92	70.42	70.92
3	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk	1.55	1,54	1.53	1.52	1.51

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

		Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana	TFR	2.03	2.02	2.01	2.01	2.01
4	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	70.29	70.30	70.31	70.32	70.33
			Nilai Kabupaten Layak Anak	560	610	660	710	760
		Tertanganinya Permasalahan Perempuan dan Anak	Cakupan OPD yang Melaksanakan Anggaran Responsif Gender (ARG)	41.38	48.28	55.17	62.07	68.97
			Cakupan korban kekerasan perempuan yang memperoleh pelayanan komprehensif	85.71	92.86	100	100	100
			Cakupan korban kekerasan anak yang mendapatkan pelayanan komprehensif	100	100	100	100	100

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

Analisis Kinerja Pelayanan DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga Sesuai dengan Renstra yang tertuang dalam capaian sasaran strategis tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD

No	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Nilai SAKIP Dinsosdaldukkb3a	Meningkatnya Implementasi SAKIP Dinsosdaldukkb3a	68,92	69,42	69,92	70,42	70,92	73.01	69,92	70,42	
2	Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri	Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	7.10	10,00	10,00	
3	Rata – Rata Angka Kelahiran Total (TFR)	Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana	2,03	2,02	2,01	2,01	2,01	2.02	2,01	2,01	

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

4	Tertanganinya Permasalahan Perempuan dan Anak	Cakupan OPD yang melaksanakan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG)	41,38	48,28	55,17	62,07	68,97	55,17	55,17	62,07	
		Cakupan korban kekerasan perempuan yang memperoleh pelayanan komprehensif	85,71	92,86	100	100	100	96,86	100	100	
		Cakupan korban kekerasan anak yang memperoleh pelayanan komprehensif	100	100	100	100	100	100	100	100	

1.3.1 Nilai SAKIP DINSOSDALDUKKBP3A

Dalam upaya untuk memenuhi dokumen perencanaan strategis perangkat daerah salah satunya yaitu SAKIP, Pada tahun 2024 Target SAKIP DINSOSDALDUKKBP3A adalah sebesar 73.01 % dengan Realisasi sebesar 73.01%

1.3.2 Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri

Di kabupaten purbalingga, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Sesuai dengan Misi ke 3 & 4 Bupati Purbalingga yaitu Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat umumnya Pangan dan apapn secara layak(Misi 3). Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat(Misi 4). Keterkaitan Misi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Misi Bupati Purbalingga yaitu:

- a. Mencegah, mengendalikan, mengatasi dan memberdayakan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS);
- b. Meningkatkan kepedulian dalam menangani penyaluran korban bencana alam dan bencana sosial.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk urusan sosial yaitu Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri. Indikator tersebut di atas, merupakan tolok ukur untuk mengetahui jumlah KPM Graduasi Sejahtera Mandiri yang ada di kabupaten purbalingga dan Pada tahun 2024 target Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri adalah 10% , realisasi sebanyak 9.99%. hal ini di karenakan pada setiap tahunnya ada tambahan jumlah kuota Penerima Manfaat (KPM).

1.3.3 Rata – Rata Angka Kelahiran Total (TFR)

TFR adalah singkatan dari *Total Fertility Rate* atau Angka Kelahiran Total yang mengindikasikan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita usia subur (15-49 tahun) di suatu wilayah dalam suatu waktu tertentu. Upaya menggerakkan program KKBPK diawali dengan menurunkan angka TFR, dan sebagai upayanya yaitu melalui pengendalian angka kelahiran dengan penggunaan alat kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur. Sebagai penyumbang dalam kenaikan TFR yaitu angka kelahiran pada usia remaja. Oleh karena itu ada beberapa kegiatan yang difokuskan dalam rangka penurunan kelahiran di usia remaja 15 – 19 tahun yaitu pembentukan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa berbasis sekolah, kampus maupun wilayah desa dan kecamatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) sehingga terjadi peningkatan usia kawin pertama yang diikuti dengan persalinan di atas usia 20 tahun.

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

Dilihat dari sisi kesehatan reproduksi tidak lagi rentan terhadap risiko tinggi persalinan.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten purbalingga melalui urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Indikator Kinerja yaitu Rata –Rata Angka Kelahiran Total (TFR) sesuai dengan Misi ke 3 (tiga) Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah: Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak dan Misi ke 4 (empat) Kepala daerah dan wakil kepala daerah; Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan. Keterkaitan Misi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Misi Bupati Purbalingga dan Wakil Bupati Purbalingga Periode 2021 - 2026 :

Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;

1. Memfasilitasi pembangunan keluarga;
2. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten purbalingga terbagi menjadi tiga urusan yaitu urusan sosial dengan satu indikator kinerja, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan satu indikator kinerja, serta

urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan dua indikator kinerja. Melalui urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dengan indikator kinerja yaitu Rata – Rata Angka Kelahiran Total (TFR) merupakan tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu Kabupaten dalam mengendalikan jumlah penduduknya melalui program Keluarga Berencana di kabupaten purbalingga.

Pada tahun 2024 target Rata–Rata Angka Kelahiran Total (TFR) adalah 2.02 % realisasi sebanyak 2.02 %.

1.3.4 Cakupan OPD yang melaksanakan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG)

Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender Anggaran Responsif Gender (ARG) merupakan bagian dari PPRG. ARG bukanlah anggaran terpisah bagi laki-laki dan perempuan, melainkan strategi untuk mengintegrasikan isu gender ke dalam proses penganggaran, dan menerjemahkan komitmen para pihak untuk mewujudkan kesetaraan gender ke dalam komitmen anggaran. Prinsip dasar penerapan ARG yakni transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Secara substansial, pro-poor budget dan gender budget pada hakikatnya terletak pada bagaimana mengubah kehidupan masyarakat miskin menjadi lebih baik, penghormatan pada orang miskin (laki-laki dan perempuan). Pro-poor budget pun sebetulnya netral gender apabila tidak mengintegrasikan kebutuhan aspek gender dan menilai ketimpangan gender ke dalamnya.

Pada tahun 2024 target Cakupan OPD yang Melaksanakan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah 48.28 % realisasi sebanyak 86.67 %.

1.3.4 Cakupan korban kekerasan yang perempuan yang memperoleh pelayanan komprehensif

berbagai macam bentuk tindakan kekerasan yang membahayakan atau mengakibatkan penderitaan pada seseorang, yang dilakukan berdasarkan perbedaan sosial termasuk gender laki-laki dan perempuan, yang dapat mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran termasuk berupa ancaman, paksaan dan berbagai bentuk lainnya yang merampas kebebasan seseorang, baik di ruang publik/ umum maupun dalam lingkungan kehidupan pribadi.

Pada tahun 2024 target korban kekerasan perempuan yang memperoleh pelayanan komprehensif adalah 100 % realisasi sebanyak 100 %.

1.3.5 Cakupan korban kekerasan anak yang memperoleh pelayanan komprehensif

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiyaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Sebagian besar terjadi kekerasan terhadap anak di rumah anak itu sendiri dengan jumlah yang lebih kecil terjadi di sekolah, di lingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi. Ada empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak: pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional/psikologis, dan pelecehan seksual anak.

Pada tahun 2024 target korban kekerasan anak yang memperoleh pelayanan komprehensif adalah 100 % realisasi sebanyak 100 %.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga tidak dapat lepas dari isu –isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis yang di maksud antara lain:

1. Masih tingginya jumlah PPKS;
2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam program KB;
3. Masih banyaknya keluarga yang masuk dalam katagori KS 1 dan Pra KS;
4. Belum optimalnya pembangunan Gender di Kabupaten Purbalingga;
5. Masih tingginya kasus-kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak;
6. Belum optimalnya pemenuhan hak anak.

2.4.Reviu Terhadap Rencana Awal RKPD

Hasil reviu terhadap Rencana Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan Tahun 2026 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

Tabel. 1.4 Reviu Terhadap Rencana Awal RKPD Tahun 2026

Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Cakupan PPKS yang mendapat program pemerintah	Dinsos dalduk kbp3a	84.03			84.03	Dinsos dalduk kbp3a		
	Nilai Sakip dinsosdaldukkbp3a	Dinsos dalduk kbp3a	73.51			Nilai Sakip dinsosdaldukkbp3a	Dinsos dalduk kbp3a	73.51	
	Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri	Dinsos dalduk kbp3a	10			Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri	Dinsos dalduk kbp3a	10	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	Dinsos dalduk kbp3a	100%		Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	Dinsos dalduk kbp3a	100%	

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

		Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Dinsos dalduk kbp3a	100					
		Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	Dinsos dalduk kbp3a	100					
		Persentase pengadaan barang milik daerah	Dinsos dalduk kbp3a	100					
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Dinsos dalduk kbp3a	100					
		Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Dinsos dalduk kbp3a	100					
		Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	Dinsos dalduk kbp3a	100					
		Persentase pengadaan barang milik daerah	Dinsos dalduk kbp3a	100					
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Dinsos dalduk kbp3a	100					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan yang ASNnya terbayar tepat waktu	Dinsos dalduk kbp3a	12 bulan	4.457.139.000				
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dinsos dalduk kbp3a	12 Dokumen	97.614.000				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan yang ASNnya terbayar tepat waktu	Dinsos dalduk kbp3a	12 bulan	4.457.139.000				
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dinsos dalduk kbp3a	12 Dokumen	97.614.000				

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Dinsos dalduk kbp3a	12 dokumen	57.645.000		Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Dinsos dalduk kbp3a	12 dokumen	57.645.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Dinsos dalduk kbp3a	35 Orang/bulan	4.301.880.000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Dinsos dalduk kbp3a	35 Orang/bulan	4.301.880.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan dan Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti	Dinsos dalduk kbp3a	100%			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan dan Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti	Dinsos dalduk kbp3a	100%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinsos dalduk kbp3a	6 Laporan	8.000.000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinsos dalduk kbp3a	6 Laporan	8.800.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Dinsos dalduk kbp3a	3 Dokumen	6.000.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Dinsos dalduk kbp3a	3 Dokumen	6.600.000
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Prosentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin dan Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya	Dinsos dalduk kbp3a	100 %			Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Prosentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin dan Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya	Dinsos dalduk kbp3a	100 %	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	Jumlah ASN yang terfasilitasi	Dinsos dalduk kbp3a	35 Orang	4.400.000		Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah ASN yang terfasilitasi	Dinsos dalduk kbp3a	35 Orang	4.400.000
	Adminsitrasi umum perangkat daerah	Jumlah administrasi umum penunjang operasional kantor	Dinsos dalduk kbp3a	12 Bulan			Adminsitrasi umum perangkat daerah	Jumlah administrasi umum penunjang operasional kantor	Dinsos dalduk kbp3a	12 Bulan	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinsos dalduk kbp3a	1 Paket	1.500.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinsos dalduk kbp3a	1 Paket	1.771.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bagan logistik kantor yang disediakan	Dinsos dalduk kbp3a	10 Paket	24.768.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bagan logistik kantor yang disediakan	Dinsos dalduk kbp3a	10 Paket	34.126.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang di sediakan	Dinsos dalduk kbp3a	12 Dokumen	800.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang di sediakan	Dinsos dalduk kbp3a	12 Dokumen	1.320.000
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Dinsos dalduk kbp3a	12 Laporan	6.328.000		Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Dinsos dalduk kbp3a	12 Laporan	6.960.000
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektornik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik	Dinsos dalduk kbp3a	12 Dokumen	3.500.000		Dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektornik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik	Dinsos dalduk kbp3a	12 Dokumen	6.573.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	Dinsos dalduk kbp3a	12 Laporan	10.156.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	Dinsos dalduk kbp3a	12 Laporan	11.900.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya barang milik daerah	Dinsos dalduk kbp3a				Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya barang milik daerah	Dinsos dalduk kbp3a		
Pengadaan peralatan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Dinsos dalduk kbp3a	1 unit	32.000.000		Pengadaan peralatan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Dinsos dalduk kbp3a	1 unit	32.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan kantor	Dinsos dalduk kbp3a	12 bulan			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan kantor	Dinsos dalduk kbp3a	12 bulan	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinsos dalduk kbp3a	12 laporan	332.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinsos dalduk kbp3a	12 laporan	457.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi. Suber daya air dan listrik yang disediakan	Dinsos dalduk kbp3a	12 laporan	167.458.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi. Suber daya air dan listrik yang disediakan	Dinsos dalduk kbp3a	12 laporan	167.458.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Dinsos dalduk kbp3a	12 laporan	1.800.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Dinsos dalduk kbp3a	12 laporan	1.800.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Dinsos dalduk kbp3a	12 laporan	745.224.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Dinsos dalduk kbp3a	12 laporan	745.224.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinsos dalduk kbp3a	12 Bulan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinsos dalduk kbp3a	12 Bulan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang dielihara dan dibayarkan pajak perizinannya	Dinsos dalduk kbp3a	89 unit	258.280.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang dielihara dan dibayarkan pajak perizinannya	Dinsos dalduk kbp3a	89 unit	284.108.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dielihara	Dinsos dalduk kbp3a	10 unit	5.000.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dielihara	Dinsos dalduk kbp3a	10 unit	5.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung KantordanBangunlainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dielihara/direhabilitasi	Dinsos dalduk kbp3a	1 unit	65.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung KantordanBangunlainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dielihara/direhabilitasi	Dinsos dalduk kbp3a	1 unit	65.000.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

Program Pemberdayaan Sosial		Cakupan potensi sumber kesejahteraan sosial yang terlibat dalam penanganan masalah sosial	Dinsos dalduk kbp3a	100%		Program Pemberdayaan Sosial		Cakupan potensi sumber kesejahteraan sosial yang terlibat dalam penanganan masalah sosial	Dinsos dalduk kbp3a	100%	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan PSKS yang dibina	Dinsos dalduk kbp3a	100%		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan PSKS yang dibina	Dinsos dalduk kbp3a	100%	
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kab/kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kab/kota	Dinsos dalduk kbp3a	18 orang	386.301.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kab/kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kab/kota	Dinsos dalduk kbp3a	18 orang	386.301.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kab/kota	Dinsos dalduk kbp3a	292 lembaga	498.000.000		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kab/kota	Dinsos dalduk kbp3a	292 lembaga	498.000.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kab/kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kab/kota	Dinsos dalduk kbp3a	1434 keluarga	7.269.000		Peningkatan Kemampuan Potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kab/kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kab/kota	Dinsos dalduk kbp3a	1434 keluarga	7.269.000
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan sumber daya manusia dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) kewenangan kab/kota	Dinsos dalduk kbp3a	sertifikat	2.440.000		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan sumber daya manusia dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) kewenangan kab/kota	Dinsos dalduk kbp3a	sertifikat	2.440.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

Program Penanganan Bencana		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Dinsos dalduk kbp3a	93.90		Program Penanganan Bencana		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Dinsos dalduk kbp3a	93.90	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan korban bencana menerima bantuan	Dinsos dalduk kbp3a	100%			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan korban bencana menerima bantuan	20.164.000	100%	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kab/kota	Dinsos dalduk kbp3a	49 orang	17.692.000		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kab/kota	Dinsos dalduk kbp3a	49 orang	17.692.000
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Cakupan kampung siaga	Dinsos dalduk kbp3a	100%			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Cakupan kampung siaga	Dinsos dalduk kbp3a	100%	
	Penyediaan Sandang	Jumlah sandang yang tersedia	Dinsos dalduk kbp3a	66 orang	10.375.000		Penyediaan tempat penampungan pengungsian	Jumlah tempat penampungan pengungsian yang ada	10.375.000	1 unit	10.375.000
	Penanganan Khusus bagi kelompok rentan	Jumlah kelompok rentan yang tertangani	Dinsos dalduk kbp3a	280	31.127.000		Penanganan Khusus bagi kelompok rentan	Jumlah kelompok rentan yang tertangani	31.127.000	280	31.127.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

		Penyediaan makananan	Jumlah orang yang mendapatkan makananan 3x1 sehari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kab/kota	Dinsos dalduk kbp3a	1000 orang	103.756.000			Penyediaan makananan	Jumlah orang yang mendapatkan makananan 3x1 sehari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kab/kota	103.756.000	1000 orang	103.756.000
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan			Persentase TMP dan makam leluhur yang fasilitasi pengelolaannya	Dinsos dalduk kbp3a	100%		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan			Persentase TMP dan makam leluhur yang fasilitasi pengelolaannya	Dinsos dalduk kbp3a	100%	
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang dipelihara	Dinsos dalduk kbp3a	100%				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang dipelihara	61.260.000	100%	
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Dinsos dalduk kbp3a	1 makam	23.807.000			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Dinsos dalduk kbp3a	1 makam	28.187..000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinsos dalduk kbp3a	1 dokumen	100.000.000		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinsos dalduk kbp3a	1 dokumen	110.000.000
Program Perlindungan Jaminan Sosial		Persentase fakir miskin mendapatkan penanganan sosial	Dinsos dalduk kbp3a	85.87 %		Program Perlindungan Jaminan Sosial		Persentase fakir miskin mendapatkan penanganan sosial	Dinsos dalduk kbp3a	85.87 %	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin cakupan daerah kab/kota	Dinsos dalduk kbp3a	71.000 orang	71.293.000		97.866.000	Jumlah fakir miskin cakupan daerah kab/kota	Dinsos dalduk kbp3a	71.000 orang	71.293.000
	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos dalduk kbp3a	1.686 keluarga	2.173.465.000		Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos dalduk kbp3a	1.686 keluarga	2.173.465.000
Program Rehabilitasi Sosial		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak	Dinsos dalduk kbp3a	100%		Program Rehabilitasi Sosial		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak	Dinsos dalduk kbp3a	100%	

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

		terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti					terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti				
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial	Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinsos dalduk kbp3a	100%			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial	Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinsos dalduk kbp3a	100%	
	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 haun kewenangan kab/kota	Dinsos dalduk kbp3a	60 orang	7.960.000		Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 haun kewenangan kab/kota	Dinsos dalduk kbp3a	60 orang	7.960.000
	Pemberian layanan reunifikasi keluarga	Jumlah PSKS yang di reunifikasi keluarga	Dinsos dalduk kbp3a	10 orang`	3.320.000		Pemberian layanan reunifikasi keluarga	Jumlah PSKS yang di reunifikasi keluarga	Dinsos dalduk kbp3a	10 orang`	3.320.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kab/kota	Dinsos dalduk kbp3a	35 orang	50.000.000		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kab/kota	Dinsos dalduk kbp3a	35 orang	50.000.000
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial kewenangan kab/kota	Dinsos dalduk kbp3a	50 orang	6.788.527.000		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial kewenangan kab/kota	Dinsos dalduk kbp3a	50 orang	6.788.527.000
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar serta glandangan pengemis dan masyarakat kewenangan kab/kota	Dinsos dalduk kbp3a	900 orang	84.427.000		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar serta glandangan pengemis dan masyarakat kewenangan kab/kota	Dinsos dalduk kbp3a	900 orang	84.427.000
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan kab/kota	Dinsos dalduk kbp3a	10 orang`	2.000.000		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan kab/kota	Dinsos dalduk kbp3a	10 orang`	2.000.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kab/kota	Dinsos dalduk kbp3a	5 orang	2.000.000		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kab/kota	Dinsos dalduk kbp3a	5 orang	2.000.000
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kab/kota	Dinsos dalduk kbp3a	10 orang	2.000.000		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kab/kota	Dinsos dalduk kbp3a	10 orang	2.000.000
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kab/kota	Dinsos dalduk kbp3a	5 orang	2.000.000		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kab/kota	Dinsos dalduk kbp3a	5 orang	2.000.000
		Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Dinsos dalduk kbp3a	70,32				Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Dinsos dalduk kbp3a	70,32	
		Nilai Kabupaten Layak Anak	Dinsos dalduk kbp3a	710				Nilai Kabupaten Layak Anak	Dinsos dalduk kbp3a	710	
		Cakupan OPD yang melaksanakan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG)	Dinsos dalduk kbp3a	62.07				Cakupan OPD yang melaksanakan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG)	Dinsos dalduk kbp3a	62.07	

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Cakupan korban kekerasan perempuan yang memperoleh pelayanan komprehensif	Dinsos dalduk kbp3a	100			Cakupan korban kekerasan perempuan yang memperoleh pelayanan komprehensif	Dinsos dalduk kbp3a	100	
	Cakupan korban kekerasan anak yang memperoleh pelayanan komprehensif	Dinsos dalduk kbp3a	100			Cakupan korban kekerasan anak yang memperoleh pelayanan komprehensif	Dinsos dalduk kbp3a	100	
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Cakupan Desa/Kelurahan layak Anak	Dinsos dalduk kbp3a	30,1		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Cakupan Desa/Kelurahan layak Anak	Dinsos dalduk kbp3a	30,1	
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelebagaan PHA yang difasilitasi	Dinsos dalduk kbp3a	2		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelebagaan PHA yang difasilitasi	Dinsos dalduk kbp3a	2	

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemerintah non pemerintah dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha	Dinsos dalduk kbp3a	1 organisasi	9.938.000		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemerintah non pemerintah dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha	Dinsos dalduk kbp3a	1 organisasi	9.938.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kab/kota	Dinsos dalduk kbp3a	3 dokumen	109.460.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kab/kota	Dinsos dalduk kbp3a	3 dokumen	109.460.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup anak yang berkembang	Dinsos dalduk kbp3a	2			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup anak yang berkembang	Dinsos dalduk kbp3a	2	

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	Dinsos dalduk kbp3a	3 dokumen	5.785.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	Dinsos dalduk kbp3a	3 dokumen	5.785.000
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	Dinsos dalduk kbp3a	9 dokumen	5.495.000		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	Dinsos dalduk kbp3a	9 dokumen	5.495.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengutan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	Dinsos dalduk kbp3a	1 dokumen	7.172.000		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengutan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	Dinsos dalduk kbp3a	1 dokumen	7.172.000
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Legislatif dan perempuan sebagai pengambilan keputusan di OPD	Dinsos dalduk kbp3a	0,61		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Legislatif dan perempuan sebagai pengambilan keputusan di OPD	Dinsos dalduk kbp3a	0,61	
		Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan rumah tangga	Dinsos dalduk kbp3a	30,35				Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan rumah tangga	Dinsos dalduk kbp3a	30,35	
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kelembagaan PUG yang aktif di OPD	Dinsos dalduk kbp3a	100%			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kelembagaan PUG yang aktif di OPD	Dinsos dalduk kbp3a	100%	

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) kewenangan kab/kota	Dinsos dalduk kbp3a	2 dokumen	211.783.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) kewenangan kab/kota	Dinsos dalduk kbp3a	2 dokumen	211.783.000
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Cakupan organisasi wanita yang difasilitasi	Dinsos dalduk kbp3a	100%			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Cakupan organisasi wanita yang difasilitasi	Dinsos dalduk kbp3a	100%	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum	Dinsos dalduk kbp3a	2 organisasi	178.924.000		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum	Dinsos dalduk kbp3a	2 organisasi	196.817.000
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kab/kota	Dinsos dalduk kbp3a	4 dokumen	3.000.000		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kab/kota	Dinsos dalduk kbp3a	4 dokumen	3.850.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina	Dinsos dalduk kbp3a	100%	14.366.000		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina	Dinsos dalduk kbp3a	100%	14.366.000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota yang mendapat peningkatan	Dinsos dalduk kbp3a	200 orang	14.366.000		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota yang mendapat peningkatan	Dinsos dalduk kbp3a	200 orang	14.366.000
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase data gender dan anak yang disediakan	Dinsos dalduk kbp3a	100%			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase data gender dan anak yang disediakan	Dinsos dalduk kbp3a	100%	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Profil Gender dan Profil Anak	Dinsos dalduk kbp3a	2			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Profil Gender dan Profil Anak	Dinsos dalduk kbp3a	2	

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Penyediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak	Dinsos dalduk kbp3a	1 dokumen	4.316.000		Penyediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak	Dinsos dalduk kbp3a	1 dokumen	4.316.000
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak yang mendapatkan perlindungan khusus		Dinsos dalduk kbp3a	22,5	254.290.000	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak yang mendapatkan perlindungan khusus		Dinsos dalduk kbp3a	22,5	254.290.000
	Persentase anak yang menjadi korban kekerasan yang ditangani		Dinsos dalduk kbp3a	100	35.607.000		Persentase anak yang menjadi korban kekerasan yang ditangani		Dinsos dalduk kbp3a	100	35.607.000
Pelembagaab PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Pelembagaan PHA yang difasilitasi		Dinsos dalduk kbp3a	2	18.879.000				37.160.000	220	18.879.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Jumlah peringatan hari anak nasional yang dilaksanakan	Dinsos dalduk kbp3a	3 perang kat daerah	7.55.000		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Jumlah peringatan hari anak nasional yang dilaksanakan	Dinsos dalduk kbp3a	3 perang kat daerah	7.55.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah desa/kelurahan layak anak yang di bentuk	Dinsos dalduk kbp3a	3 dokum en	11.824.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah desa/kelurahan layak anak yang di bentuk	Dinsos dalduk kbp3a	3 dokum en	11.824.000
	Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang berkembang	Dinsos dalduk kbp3a	57	16.188.000		Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang berkembang	Dinsos dalduk kbp3a	57	16.188.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah kegiatan forum anak tingkat kabupaten yang dilaksanakan	Dinsos dalduk kbp3a	2 kali	5.981.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah kegiatan forum anak tingkat kabupaten yang dilaksanakan	Dinsos dalduk kbp3a	2 kali	5.981.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	KIE Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah sticker dan Pamflet	Dinsos dalduk kbp3a	300 Stiker dan 300 Pamflet	1.868.000		KIE Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah sticker dan Pamflet	Dinsos dalduk kbp3a	300 Stiker dan 300 Pamflet	1.868.000
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan KHA bagi kepala sekolah SD/MI, forum anak lintas perempuan dan ormas	Dinsos dalduk kbp3a	80 orang	8.339.000		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan KHA bagi kepala sekolah SD/MI, forum anak lintas perempuan dan ormas	Dinsos dalduk kbp3a	80 orang	8.339.000
Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Dinsos dalduk kbp3a	2,64			Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Dinsos dalduk kbp3a	2,64		
	Pencegahan kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan thd perempuan yang tertangani	Dinsos dalduk kbp3a	100%			Pencegahan kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan thd perempuan yang tertangani	Dinsos dalduk kbp3a	100%	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan	Dinsos dalduk kbp3a	3 perangkat daerah	6.480.000		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Rakor PPT	Dinsos dalduk kbp3a	3	6.480.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota				Kewenangan Kabupaten/Kota				
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti	Dinsos dalduk kbp3a	15		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti	Dinsos dalduk kbp3a	15	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kab/kota yang mendapat layanan pengaduan	Dinsos dalduk kbp3a	15 orang	31.983.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kab/kota yang mendapat layanan pengaduan	13.983.000	15 orang	31.983.000
		Rata – Rata Angka Kelahiran Total / TFR,	Dinsos dalduk kbp3a	2,01			Rata – Rata Angka Kelahiran Total / TFR,	Dinsos dalduk kbp3a	2,01	
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Cakupan keluarga yang mengikuti kelompok UPPKS	Dinsos dalduk kbp3a	10.32		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Cakupan keluarga yang mengikuti kelompok UPPKS	Dinsos dalduk kbp3a	10.32	

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB, BKR, BKL ber KB	Dinsos dalduk kbp3a				Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB, BKR, BKL ber KB	Dinsos dalduk kbp3a		
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Dinsos dalduk kbp3a	100%			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinsos dalduk kbp3a	100%	
	Promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	Jumlah laporan hasil promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	Dinsos dalduk kbp3a	8 laporan	7.039.000		Promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	Dinsos dalduk kbp3a	8 laporan	7.039.000
	Pemantauan data dan informasi Kelauga berresiko stunting (termasuk remaja clon pengantin/Calon PUS,Ibu	Jumlah Data dan informasi keluarga beresiko stunting yang di himpun oleh Balai Penyuluhan KB	18 kec	100	2.307.000.000		Pemantauan data dan informasi Kelauga berresiko stunting (termasuk remaja clon pengantin/Calon PUS,Ibu hamil,Pasca	18 kec	100	2.307.000.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	hamil,Pasca persalinan/kelahiran,baduta/balita)						persalinan/kelahiran, baduta/balita)				
	Pendampingan keluarga beresiko stunting (termasuk remaja clon pengantin/Calon PUS,Ibu hamil,Pasca persalinan/kelahiran,baduta/balita)	Jumlah Tim Pendamping Keluarga yang ada di kab.purbaingga	Orang	2307	2.537.700.000		Pendampingan keluarga beresiko stunting (termasuk remaja clon pengantin/Calon PUS,Ibu hamil,Pasca persalinan/kelahiran, baduta/balita)	Jumlah Tim Pendamping Keluarga yang ada di kab.purbaingga	Orang	2307	2.537.700.000
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga sejahtera	Dinsos dalduk kbp3a	293			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga sejahtera	Dinsos dalduk kbp3a	293	

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah laporan hasil orientasi dan pelatihan teknis pengelolaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Dinsos dalduk kbp3a	3 laporan	9.417.000		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah laporan hasil orientasi dan pelatihan teknis pengelolaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Dinsos dalduk kbp3a	3 laporan	9.417.000
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL,BKR,PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah laporan hasil orientasi dan pelatihan teknis pengelolaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Dinsos dalduk kbp3a	1 laporan	7.039.000		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah laporan hasil orientasi dan pelatihan teknis pengelolaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Dinsos dalduk kbp3a	1 laporan	7.039.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Dinsos dalduk kbp3a	20 unit	300.000.000		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi kelaurga/UPPKS)	Dinsos dalduk kbp3a	20 unit	300.000.000
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need KB)	Dinsos dalduk kbp3a	0,44			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need KB)	Dinsos dalduk kbp3a	0,44		
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dinsos dalduk kbp3a					Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dinsos dalduk kbp3a			

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya advokasi KIE pengendalian penduduk dan KB	Dinsos dalduk kbp3a	100%			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya advokasi KIE pengendalian penduduk dan KB	Dinsos dalduk kbp3a	100%	
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi program bangga kencana (pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana) kepada stakeholder dan mitra kerja	Dinsos dalduk kbp3a	30 organisasi	250.000.000		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi program bangga kencana (pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana) kepada stakeholder dan mitra kerja	Dinsos dalduk kbp3a	30 organisasi	250.000.000
	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah media promosi KIE yang digunakan	Dinsos dalduk kbp3a	2 unit	66.976.000		Penggunaan media masa cetak elektronik dan media lainnya sesuai kearifan budaya lokal dalam pencitraan program KKBPK	Jumlah media promosi KIE yang digunakan	Dinsos dalduk kbp3a	2 unit	66.976.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah dokumen promosi dan KIE program bangka kencana (Pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana) melalui media masa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Dinsos dalduk kbp3a	3 dokumen	152.500.000		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah dokumen promosi dan KIE program bangka kencana (Pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana) melalui media masa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Dinsos dalduk kbp3a	3 dokumen	152.500.000
	Pelaksanaan mekanisme oprasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (RAKORCAM) rapat koordinasi desa(RAKORDES) dan mini lokakarya(MINILOK)	Jumlah laporan mekanisme oprasional program bangga kencana(pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana)	Dinsos dalduk kbp3a	6 laporan	270.000.000		Pelaksanaan mekanisme oprasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (RAKORCAM) rapat koordinasi desa(RAKORDES) dan mini lokakarya(MINILOK)	Jumlah laporan mekanisme oprasional program bangga kencana(pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana)	Dinsos dalduk kbp3a	6 laporan	270.000.000
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah laporan hasil pengelolaan oprsional sarana di balai penyuluhan bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan kelaurga berencana)	Dinsos dalduk kbp3a	1 laporan	892.800.000		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah laporan hasil pengelolaan oprasional sarana di balai penyuluhan bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan kelaurga berencana)	Dinsos dalduk kbp3a	1 laporan	892.800.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Pengendalian program KKBPK	Jumlah laporan hasil pengendalian program KKBPK	Dinsos dalduk kbp3a	2 laporan	80.000.000		Pengendalian program KKBPK	Jumlah laporan hasil pengendalian program KKBPK	Dinsos dalduk kbp3a	2 laporan	80.000.000
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase tenaga penyuluh KB yang diperdagakan	Dinsos dalduk kbp3a	100			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase tenaga penyuluh KB yang diperdagakan	Dinsos dalduk kbp3a	100	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader yang mengikuti penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	Dinsos dalduk kbp3a	1808 orang	887.000.000		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader yang mengikuti penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	Dinsos dalduk kbp3a	1808 orang	887.000.000
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pendistribusian alat dan obat kontasepsi ke wilayah	Dinsos dalduk kbp3a	100%			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pendistribusian alat dan obat kontasepsi ke wilayah	Dinsos dalduk kbp3a	100%	

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jejaringan dan jejaringnya	Dinsos dalduk kbp3a	49 laporan	32.400.000		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jejaringan dan jejaringnya	Dinsos dalduk kbp3a	49 laporan	32.400.000
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah laporan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP.	Dinsos dalduk kbp3a	5 laporan	3.320.000		Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah peserta KB yang mengalami komplikasi berat dan kegagalan KB MKJP.	Dinsos dalduk kbp3a	10 org	3.320.000
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah unit saranaPenunjang Pelayanan KB	Dinsos dalduk kbp3a	40 unit	2.739.120.000		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah unit saranaPenunjang Pelayanan KB	Dinsos dalduk kbp3a	40 unit	2.739.120.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Dinsos dalduk kbp3a	4188 orang	2.053.207.000		Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Dinsos dalduk kbp3a	4188 orang	2.053.207.000
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jejaring dan jejaringnya	Dinsos dalduk kbp3a	2 laporan	30.861.000		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jejaring dan jejaringnya	Dinsos dalduk kbp3a	2 laporan	30.861.000
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need KB)	Dinsos dalduk kbp3a	9			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need KB)	Dinsos dalduk kbp3a	9	

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) di kampung KB	Dinsos dalduk kbp3a	36 kampung KB	567.000.000		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) di kampung KB	Dinsos dalduk kbp3a	36 kampung KB	567.000.000
	integrasi lintas sektoral dikampung KB	Jumlah Kampung KB yang terintegrasi	Dinsos dalduk kbp3a	36 kampung KB	3.750.000		Terlaksananya integrasi lintas sektoral dikampung KB	Jumlah Kampung KB yang terintegrasi	Dinsos dalduk kbp3a	36 kampung KB	3.750.000
	Penguatan Peran Serta Organisasi kemasyarakatan dan Mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan KB	Jumlah Rakor yang dilaksanakan	Dinsos dalduk kbp3a	6 Kali	12.676.000		Terlaksananya Penguatan Peran Serta Organisasi kemasyarakatan dan Mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan KB	Jumlah Rakor yang dilaksanakan	Dinsos dalduk kbp3a	6 Kali	12.676.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

Program Pengendalian Penduduk		Persentase kebijakan dokumen kebijakan pengendalian penduduk	Dinsos dalduk kbp3a	100		Program Pengendalian Penduduk		Persentase kebijakan dokumen kebijakan pengendalian penduduk	Dinsos dalduk kbp3a	100	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase kebijakan yang mendukung pengendalian kuantitas penduduk	Dinsos dalduk kbp3a	100%			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase kebijakan yang mendukung pengendalian kuantitas penduduk	Dinsos dalduk kbp3a	100%	
	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah laporan srasehan hasil pemutakhiran	Dinsos dalduk kbp3a	1 laporan	2.557.000		Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah laporan srasehan hasil pemutakhiran	Dinsos dalduk kbp3a	1 laporan	2.557.000
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah laporan rapat pengendalian program bangga kencana(pembangunan keluarga kendudukan dan keluarga berencana)	Dinsos dalduk kbp3a	4 laporan	5.976.000		Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah laporan rapat pengendalian program bangga kencana(pembangunan kelaurga kendudukan dan keluarga berencana)	Dinsos dalduk kbp3a	4 laporan	5.976.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Implementasi Pendidikan kependudukan Jalur pendidikan Formal dan non formal	Jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan advokasi sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di datuan pendidikan jenjang sd.mi,sltp/mts jalur nonformal informal	Dinsos dalduk kbp3a	1 satuan pendidikan	6.225.000		Implementasi Pendidikan kependudukan Jalur pendidikan Formal dan non formal	Jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan advokasi sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di datuan pendidikan jenjang sd.mi,sltp/mts jalur nonformal informal	Dinsos dalduk kbp3a	1 satuan pendidikan	6.847.000
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan wilayah yang terpetakan dalam profil kependudukan dan KB	Dinsos dalduk kbp3a	100%			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan wilayah yang terpetakan dalam profil kependudukan dan KB	Dinsos dalduk kbp3a	100%	
	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen profil kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Dinsos dalduk kbp3a	30 dokumen	13.561.000		Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen profil kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Dinsos dalduk kbp3a	30 dokumen	18.646.000
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pelayanan sistem informasi keluarga	Dinsos dalduk kbp3a	18 laporan	2.059.000		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pelayanan sistem informasi keluarga	Dinsos dalduk kbp3a	18 laporan	73.450.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Penyediaan data dan informasi keluarga	Jumlah data dan informasi keluarga yang tersedia	Dinsos dalduk kbp3a	1 dokumen	25.605.000		Penyediaan data dan informasi keluarga	Jumlah data dan informasi keluarga yang tersedia	Dinsos dalduk kbp3a	1 dokumen	25.605.000
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Dinsos dalduk kbp3a	1 dokumen	223.941.000		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Dinsos dalduk kbp3a	1 dokumen	133.682.000
	Pencatatan dan pengumpulan data Keluarga	Jumlah kader yang terfasilitasi	Dinsos dalduk kbp3	1808 kader	186.600.000		Pencatatan dan pengumpulan data Keluarga	Jumlah Kader yang terfasilitasi	Dinsos dalduk kbp3	1808 kader	198.660.000

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Purbalingga tahun 2026 ada beberapa usulan program dan kegiatan masyarakat yang dapat di verifikasi oleh DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga dengan alasan usulan tersebut sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi DINSOSDALDUKKBP3A Khususnya pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun usulan program dan Kegiatan Masyarakat yang di Verifikasi antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Pengusul	Permasalahan	Usulan	Alamat
1	MUKHAMMAD TOFIKUROKHMAN	<p>1. Perubahan masyarakat akan tuntutan yang lebih tinggi terhadap pelayanan public</p> <p>2. Desa saat ini memiliki peran yang lebih besar dan dalam menentukan dan memimpin pembangunan di daerahnya</p> <p>3. Kemajuan teknologi memiliki perna yang besar sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas</p>	<p>Penguatan kelembagaan / Penyuluhan mengenai hak anak dan perempuan</p>	<p>Kantor Desa Tlagayasa, Jl Raya Pemalang-Bobotsari Km 4 Tlagayasa, Kab. Purbalingga, Bobotsari, Tlagayasa</p>

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

2	SUGIMIN, SH	Rendahnya pengetahuan tentang Teknologi (IT)	Penguatan kelembagaan / Penyuluhan mengenai hak anak dan perempuan	BOJONG, Kab. Purbalingga, Mrebet, Bojong
3	SUGITO, SE	Peningkatan kapasitas Karang Taruna	Penyuluhan dan pelatihan bidang pemuda	Desa Serang, Kab. Purbalingga, Karangreja, Serang
4	ASIH BUDIYANI	peningkatan kapasitas bagi perempuan	Penguatan kelembagaan / Penyuluhan mengenai hak anak dan perempuan	Desa Palumbungan, Kab. Purbalingga, Bobotsari, Palumbungan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa untuk dilaksanakan dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pencapaian tujuan dilaksanakan secara bertahap mulai dari jangka tahunan, jangka menengah hingga jangka panjang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2005 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR.

Dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga, maka berdasarkan Rencana Awal RKP Tahun 2026 dan RKPD Kabupaten Purbalingga tahun 2026 dapat disusun hubungan antara Kebijakan Pembangunan Nasional dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 sebagai berikut;

Tabel. 1.5. Hubungan Antara Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Daerah

A. Proritas Pembangunan Nasional

1. Pembangunan sumber Daya Manusia (SDM) dengan prioritas utama: membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, mengetahui ilmu pengetahuan dan teknohehi; mengundang kerja sama dengan talenta-talenta global; mengoptimalkan kerja sama dengan industri; penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh plosok negeri
2. Pembangunan infrastruktur dengan proritas utama: menghubungkan kawasan produksi dengan distribusi; mempermudah akses ke kawasan wisata;

mendongkrak lapangan kerja baru; mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan regulasi dengan prioritas utama: menerbitkan undang-undang cipta lapangan kerja dan undang-undang pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah; merevisi undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pembangunan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi dengan prioritas utama: pemangkasan prosedur dan birokrasi; penyederhanaan eselonisasi dan di ganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi; dan serius dalam pencapaian program pembangunan;
5. Transformasi ekonomi dengan prioritas utama transformasi dan ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

B. Prioritas Pembanunan Daerah

1. Percepatan pemulihan ekonomi daerah dengan berfokus pada:
 - a. Pemberian stimulus kepada pelaku usaha mikro – kecil secara tepat sasaran berupa:
 - Fasilitasi proses produksi;
 - Fasilitasi permodalan usaha;
 - Pengembangan branding produk usaha mikro kecil purbalingga;
 - Pelatihan kewirasusahaan;
 - Pengembangan sentra IKM.
 - b. Menciptakan perluasan lapangan kerja, antara lain melalui:
 - Program kartu prakerja purbalingga;
 - Mendorong percepatan realisasi investasi;
 - Sinergitas pelatihan ketrampilan produktif.
 - c. Pemulihan aktifitas wisata dan ekonomi kreatif, antara lain melalui:
 - Pengembangan sinergitas pelaku wisata dan pendukung wisata;
 - Mendorong penyelenggaraan event nasional dan internasional;
 - Peningkatan kapasitas pelaku wisata dan ekonomi kreatif;
 - Refitalisasi *Tourism Information Center (TIC)*;
 - Penguatan dan pengembangan desa wisata

- d. Mengembangkan komoditas sektor primer yang memiliki nilai strategis, antara lain melalui:
 - Asuransi pertanian;
 - Revitalisasi sarana dan prasarana pertanian;
 - Pengembangan komoditas pertanian unggulan dan bernilai tambah tinggi;
 - Pengembangan kluster ikan hias;
 - e. Peningkatan pasar rakyat
 - Rehabilitasi pasar pemda;
 - Rehabilitasi pasar desa;
 - Rehabilitasi pasar rakyat.
2. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, dengan berfokus pada:
- a. Meningkatkan ketercukupan kebutuhan pokok masyarakat, antara lain melalui:
 - Meningkatkan akses pangan utamanya bagi kelompok rentan;
 - Peningkatan akseds air bersih;
 - Penyediaan rumah layak huni;
 - Penyediaan akses sanitasi masyarakat.
 - b. Peningkatan layanan kesejahteraan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) antarlain melalui:
 - Santunan kematian bagi keluarga kurang mampu;
 - Revitalisasi rumah singgah;
 - Peningkatan akurasi sasaran perlindungan sosial;
 - Fasilitasi dan bantuan kepada PPKS.
3. Pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur berkelanjutan, dengan fokus pada:
- a. Memperkust infrastruktur jalan untuk mendukung penghngembangan ekonomi pelayanan dasar dan kawasan khusus.
 - b. Memperkuat infrastruktur perhubungan untuk mendukung kelancaran arus barang dan orang;
 - c. Peningkatan infrastruktur dan manajemen pengelolaan sampah;
 - d. Pembangunan ruang terbuka hijau.
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan berfokus pada :
- a. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, utamanya melalui:
 - Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
 - Peningkatan *image* layanan kesehatan pemerintah;
 - penyediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan;

- integrasi layanan kesehatan dan peningkatan SDM kesehatan.
- b. Peningkatan akses dan pelayanan pendidikan, utamanya melalui
 - penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sesuai standar nasional pendidikan;
 - gerakan kembali ke sekolah; penguatan PKBM/Kejar Paket;
 - peningkatan management sekolah dan pembangunan kerja sama dengan perguruan tinggi;
- c. Peningkatan pelayanan KB
- d. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak, utamanya melalui
 - pembentukan desa ramah anak;
 - revitalisasi forum lintas perempuan
- e. Pengembangan kegiatan kepemudaan dan olahraga, utamanya melalui
 - fasilitasi pemuda bertalenta tinggi dan berprestasi;
 - fasilitasi berkembangnya olahraga prestasi.
- 5. Penguatan desa dengan berfokus pada:
 - a. Optimalisasi potensi desa melalui pembangunan desa tematik;
 - b. Peningkatan peran serta masyarakat melalui penguatan peran lembaga kemasyarakatan dan pembangunan daerah
 - c. Peningkatan tertib administrasi tatkelola pemerintahan desa melalui digitalisasi desa, pembinaan dan pengawasan administrasi desa, penghargaan desa berprestasi
 - d. Peningkatan sarana dan prasarana desa
- 6. Peningkatan pelayanan publik dengan berfokus pada:
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis kinerja melalui pengembangan regulasi dan sistem penunjang kerja;
 - b. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan antara lain melalui: meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan; membangun lingkungan budaya birokrasi yang berswih dan melayani
 - c. Peningkatan inovasi pelayanan publik, antara lain melalui: digitalisasi pelayanan publik dan sistem teknologi informasi yang terintegrasi; pembangunan mall pelayanan publik; satu OPD atau satu inovasi pelayanan publik
 - d. Mewujudkan kemandirian, ketentraman dan ketertiban umum melalui: memfasilitasi komunikasi antar dan intern umat beragama; penguatan aparat trantibum; mendorong ketentraman dan ketertiban umum berbasis masyarakat; Peningkatan ketahanan bencana; fasilitasi sosial dan kegiatan keagamaan lain.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA.

Penyusunan Renja dan Renstra harus memiliki hubungan yang selaras, sehingga tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2026 juga merupakan tujuan dan sasaran yang tercantum di RENSTRA DINSOSDALDUKKBP3A tahun 2021-2026 sebagai berikut.

1. Meningkatkan Perlindungan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan

Sosial, dengan sasaran:

- Meningkatkan Kualitas Kelembagaan DINSOSDALDUKKBP3A
- Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

2. Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk

- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana

3. Meningkatkan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- Tertanganinya Permasalahan Perempuan dan Anak.

Bila dibandingkan dengan pencapaian sasaran Renja Tahun 2024, maka tujuan dan sasaran tersebut relevan dan layak karena merupakan cerminan tugas pokok dan fungsi DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan Pembangunan di Kabupaten Purbalingga.

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan yang dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif serta mendukung aspek yang relevan. Indikator Kinerja Program/Kegiatan Dinsosdaldukkbp3a Kabupaten Purbalingga sebagai berikut.

Tabel. 1.6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan perkiraan Maju Tahun 2028

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Tahun 2026				Catatan Penting	Tahun 2028	
		Lokasi	Target	Kebutuhan	Sumber Dana		Target	Kebutuhan
4	5		9	10	11	12	13	15
	Persentase PPKS yang mendapat program pemerintah	Dinsosdaldukkbp3a	80,5				80,5	
	Nilai Sakip dinsosdaldukkbp3a	Dinsosdaldukkbp3a	68,92				68,92	
	Cakupan KPM	Dinsosdaldukkbp3a	10				10	
	Graduasi							
	Sejahtera							
	Mandiri							
Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	Dinsosdaldukkbp3a	100%				100%	
	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Dinsosdaldukkbp3a	100				100	

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

		Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	Dinsosdaldukkbp3a	100	10,5			100	10,5
		Persentase pengadaan barang milik daerah	Dinsosdaldukkbp3a	100	3,01			100	3,01
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Dinsosdaldukkbp3a	100	279,406			100	279,406
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan yang ASNnya terbayar tepat waktu	Dinsosdaldukkbp3a	12 bulan				12 bulan	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dinsosdaldukkbp3a	12 dokumen	88.740.000			12 Dokumen	97.614.000
	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Dinsosdaldukkbp3a	12 dokumen	54.900.000			12 dokumen	60.390.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Dinsosdaldukkbp3a	12 bulan	4.414.739.000			12 bulan	4.856.213.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan dan Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti	Dinsosdaldukkbp3a	100%				100%	

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinsosdaldukkbp3a	4 Laporan	8.000.000			4 Laporan	8.800.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Dinsosdaldukkbp3a	3 Dokumen	6.000.000			3 Dokumen	6.300.000
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Prosentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin dan Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya	Dinsos dalduk kbp3a	100%	4.000.000			100%	4.400.000
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Dinsosdaldukkbp3a	Orang	4.000.000			Orang	4.400.000
	Adminsitration umum perangkat daerah	Jumlah administrasi umum penunjang operasional kantor	Dinsosdaldukkbp3a	12 Bulan				12 Bulan	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinsosdaldukkbp3a	1 Paket	1.500.000			1 Paket	1.650.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bagan logistik kantor yang disediakan	Dinsosdaldukkbp3a	10 Paket	24.768.000			10 Paket	27.245.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang di sediakan	Dinsosdaldukkbp3a	12 Dokumen	800.000			12 Dokumen	880.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Dinsosdaldukkbp3a	12 Laporan	6.328.000			12 Laporan	8.960.000
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektornik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik	Dinsosdaldukkbp3a	12 Dokumen	3.600.000			12 Dokumen	3.960.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	Dinsosdaldukkbp3a	12 Laporan	10.156.000			12 Laporan	11.172.000
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya barang milik daerah	Dinsosdaldukkbp3a	1 unit				1unit	
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor yang disediakan	Dinsosdaldukkbp3a	1 unit	32.000.000			1 unit	35.200.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan kantor	Dinsosdaldukkbp3a	12 bulan	877.059.000			12 bulan	877.059.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinsosdaldukkbp3a	12 laporan	332.000			12 laporan	365.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi. Suber daya air dan listrik yang disediakan	Dinsosdaldukkbp3a	12 laporan	193.858.000			12 laporan	213.244.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Dinsosdaldukkbp3a	12 laporan	1.800.000			12 laporan	1.980.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Dinsosdaldukkbp3a	12 laporan	747.624.000			12 laporan	822.368.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinsosdaldukkbp3a	12 Bulan	320.158.000			12 Bulan	320.158.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang dielihara dan dibayarkan pajak perizinannya	Dinsosdaldukkbp3a	89 unit	258.280.000			89 unit	284.108.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dielihara	Dinsosdaldukkbp3a	10 unit	5.000.000			10 unit	5.500.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung KantordanBangunlainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dielihara/direhabilitasi	Dinsosdaldukkbp3a	1 unit	49.200.000			1 unit	54.120.000
	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan potensi sumber kesejahteraan sosial yang terlibat dalam penanganan masalah sosial	Dinsosdaldukkbp3a	100%				100%	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PSKS yang dibina	Dinsosdaldukkbp3a	100%				100%	

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kab/kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kab/kota	Dinsosdaldukkbp3a	18 orang	386.301.000			18 orang	424.931.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kab/kota	Dinsosdaldukkbp3a	292 lembaga	458.000.000			292 lembaga	508.800.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kab/kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kab/kota	Dinsosdaldukkbp3a	1434 keluarga	7.269.000			1434 keluarga	7.996.000
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan sumber daya manusia dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) kewenangan kab/kota	Dinsosdaldukkbp3a	sertifikat	2.440.000			sertifikat	2.684.000
Program Penanganan Bencana		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Dinsosdaldukkbp3a	93.90				93.90	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan korban bencana menerima bantuan	Dinsosdaldukkbp3a	100%				100%	

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kab/kota	Dinsosdaldukkbp3a	49 orang	17.692.000			49 orang	19.461.000
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Cakupan kampung siaga	Dinsosdaldukkbp3a	100%				100%	
		Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsosdaldukkbp3a	175 orang	10.375.000			10.375.000	11.412.000
		Penyediaan makananan	Jumlah orang yang mendapatkan makananan 3x1 sehari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kab/kota	Dinsosdaldukkbp3a	1000 orang	103.756.000			1000 orang	114.131.000
		Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsosdaldukkbp3a	200 orang	31.127.000			200 orang	34.240.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Persentase TMP dan makam leluhur yang fasilitas pengelolaannya	Dinsosdaldukkbp3a	100%				100%	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang dipelihara	Dinsosdaldukkbp3a	100%				100%	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Dinsosdaldukkbp3a	1 makam	23.807.000			1 makam	26.187.000
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinsosdaldukkbp3a	1 dokumen	100.000.000			1 dokumen	11.000.000
Program Perlindungan Jaminan Sosial		Persentase fakir miskin mendapatkan penanganan sosial	Dinsosdaldukkbp3a	85.87%				85.87%	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin cakupan daerah kab/kota	Dinsosdaldukkbp3a	71.000 orang	71.293.000			71.000 orang	78.244.000
	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsosdaldukkbp3a	1.686 keluarga	2.233.065.000			1.686 keluarga	2.456.371.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

Program Rehabilitasi Sosial		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Dinsosdaldukkbp3a	100%				100%	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial	Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinsosdaldukkbp3a	100%				100%	
	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 haun kewenangan kab/kota	Dinsosdaldukkbp3a	60 orang	7.960.000			60 orang	8.756.000
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kab/kota	Dinsosdaldukkbp3a	35 orang	50.000.000			35 orang	55.000.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial kewenangan kab/kota	Dinsosdaldukkbp3a	50 orang	6.506.460.000			50 orang	7.157.106.000
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar serta glandangan pengemis dan masyarakat kewenangan kab/kota	Dinsosdaldukkbp3a	900 orang	84.427.000			900 orang	92.870.000
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan kab/kota	Dinsosdaldukkbp3a	10 orang`	2.000.000			10 orang`	2.200.000
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kab/kota	Dinsosdaldukkbp3a	5 orang	2.000.000			5 orang	2.200.000
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kab/kota	Dinsosdaldukkbp3a	10 orang	2.000.000			10 orang	2.200.000
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran kelaurga kewenangan kab/kota	Dinsosdaldukkbp3a	5 orang	2.000.000			5 orang	2.200.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Dinsosdaldukkbp3a	70,29				70,29	
	Nilai Kabupaten Layak Anak	Dinsosdaldukkbp3a	560				560	
	Cakupan OPD yang melaksanakan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG)	Dinsosdaldukkbp3a	41,38				41,38	
	Cakupan korban kekerasan perempuan yang memperoleh pelayanan komprehensif	Dinsosdaldukkbp3a	85,71				85,71	
	Cakupan korban kekerasan anak yang memperoleh pelayanan komprehensif	Dinsosdaldukkbp3a	100				100	
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Cakupan Desa/Kelurahan layak Anak	Dinsosdaldukkbp3a	30,1			30,1	
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelebagaan PHA yang difasilitasi	Dinsosdaldukkbp3a	2				2	

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemerintah non pemerintah dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha	Dinsosdaldukkbp3a	1 organisasi	159.936.000			1 organisasi	175.932.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kab/kota	Dinsosdaldukkbp3a	3 dokumen	9.460.000			3 dokumen	10.406.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup anak yang berkembang	Dinsosdaldukkbp3a	2				2	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	Dinsosdaldukkbp3a	3 dokumen	5.785.000			3 dokumen	6.363.000
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan	Dinsosdaldukkbp3a	9 dokumen	5.495.000			9 dokumen	6.045.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

			peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota						
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengutan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	Dinsosdaldukkbp3a	1 dokumen	7.172.000		1 dokumen	7.889.000
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan			Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Legislatif dan perempuan sebagai pengambilan keputusan di OPD	Dinsosdaldukkbp3a	0,61			0,61	
			Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan rumahtangga	Dinsosdaldukkbp3a	30,35			30,35	
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kelembagaan PUG yang aktif di OPD	Dinsosdaldukkbp3a	100%			100%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) kewenangan kab/kota	Dinsosdaldukkbp3a	2 dokumen	11.783.000		2 dokumen	12.961.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

<p>Pemberdayaan perempuan bidang politik, Hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota</p>	<p>jumlah lembaga pemberdayaan perempuan di lembaga politik, hukum dan sosial</p>	<p>Lembaga</p>	<p>1 lembaga</p>				<p>1 lembaga</p>	
<p>Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</p>	<p>Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kab/kota</p>	<p>Dinsosdaldukkb3a</p>	<p>4 dokumen</p>	<p>3.000.000</p>			<p>100%</p>	<p>3.300.000</p>
<p>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</p>	<p>Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum</p>	<p>Dinsosdaldukkb3a</p>	<p>2 organisasi</p>	<p>196.924.000</p>			<p>2 organisasi</p>	<p>216.616.000</p>
<p>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Cakupan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina</p>	<p>Dinsosdaldukkb3a</p>	<p>100%</p>				<p>100%</p>	

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota yang mendapat peningkatan	Dinsosdaldukkbp3a	200 orang	23.700.000			200 orang	26.070.000
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak		Persentase data gender dan anak yang disediakan	Dinsosdaldukkbp3a	100%				100%	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Profil Gender dan Profil Anak	Dinsosdaldukkbp3a	2	4.316.000			2	4.747.000
	Penyediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak	Dinsosdaldukkbp3a	1 dokumen	4.316.000			5.395.000	4.747.000
Program Perlindungan Khusus Anak		Persentase anak yang mendapatkan perlindungan khusus	Dinsosdaldukkbp3a	22,5				22,5	
		Persentase anak yang menjadi korban kekerasan yang ditangani	Dinsosdaldukkbp3a	100				100	
	Pencegahan Terhadap anak Yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat penurunan kekerasan terhadap anak	Dinsosdaldukkbp3a	220				220	

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi kebijakan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/kota	Dinsosdaldukkbp3a	3 perangkat daerah	161.761.000			3 perangkat daerah	177.937.000
	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kota/kabupaten layak anak kecamatan layak anak desa/kelurahan layak anak dan DRPPA	Jumlah perangkat daerah yang menjalin kerja sama	Dinsosdaldukkbp3a	3 perangkat daerah	2.500.000			3 perangkat daerah	2.750.000
	Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Dinsosdaldukkbp3a	50 orang	6.644.000			50 orang	6.644.000
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan kab/kota	Dinsosdaldukkbp3a	50 orang	6.644.000			50 orang	6.644.000
	Koordinasi layanan AMPK	Jumlah koordinasi layanan yang dilaksanakan	Dinsosdaldukkbp3a	12 bulan	183.390.000			12 bulan	192.475.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Dinsosdaldukkbp3a	100%				100%	
	Peningkatan Kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Dinsosdaldukkbp3a	5 kali	30.470.000			5 kali	33.517.000
Program Perlindungan Perempuan		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Dinsosdaldukkbp3a	2,64				2,64	
	Pencegahan kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan thd perempuan yang tertangani	Dinsosdaldukkbp3a	100%				100%	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota	Dinsosdaldukkbp3a	3 perangkat daerah	6.480.000			3 perangkat daerah	7.121.000
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti	Dinsosdaldukkbp3a	15				15	

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kab/kota yang mendapat layanan pengaduan	Dinsosdaldukkbp3a	15 orang	31.983.000			15 orang	35.181.000
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjut usia bagi Perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten kota	Jumlah layanan rujukan yang tersedia	Dinsosdaldukkbp3a	12 layanan	46.750.000			12 layanan	51.425.000
	Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan Perempuan Tingkat daerah kabupaten kota	Persentase lembaga penyedia layanan yang ada	Dinsosdaldukkbp3a	100%				100%	
	Peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga penanganan bagi Perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten kota	Jumlah kegiatan yang di laksanakan	Dinsosdaldukkbp3a	5 kegiatan	36.550.000			5 kali	42.405.000
		Rata – Rata Angka Kelahiran Total / TFR,	Dinsosdaldukkbp3a	2,03				2,03	
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera		Cakupan keluarga yang mengikuti kelompok UPPKS	Dinsosdaldukkbp3a	10.32				10.32	
		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB, BKR, BKL ber KB	Dinsosdaldukkbp3a	83.77				83.77	

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Dinsosdaldukkbp3a	100%				100%	
	Promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	Jumlah laporan hasil promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	Dinsosdaldukkbp3a	8 laporan	22.100.000			8 laporan	24.310.000
	Pemantauan data dan informasi Kelauga berresiko stunting (termasuk remaja clon pengantin/Calon PUS,Ibu hamil,Pasca persalinan/kelahiran,baduta/balita)	Jumlah Data dan informasi keluarga beresiko stunting yang di himpun oleh Balai Penyuluhan KB	Dinsosdaldukkbp3a	100	2.304.000.000			100	2.534.400.000
	Pendampingan keluarga beresiko stunting (termasuk remaja clon pengantin/Calon PUS,Ibu hamil,Pasca persalinan/kelahiran,baduta/balita)	Jumlah Tim Pendamping Keluarga yang ada di kab.purbaingga	Dinsosdaldukkbp3a	2307	2.678.400.000			2307	2.906.820.000
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga sejahtera	Dinsosdaldukkbp3a	293				293	

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah laporan hasil orientasi dan pelatihan teknis pengelolaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi kelaurga/UPPKS)	Dinsosdaldukkbp3a	3 laporan	9.417.000			3 laporan	10.358.000
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL,BKRPPKS,PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah laporan hasil orientasi dan pelatihan teknis pengelolaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi kelaurga/UPPKS)	Dinsosdaldukkbp3a	1 laporan	7.039.000			1 laporan	7.743.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Dinsosdaldukkbp3a	20 unit	150.000.000			20 unit	165..000.000
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need KB)	Dinsosdaldukkbp3a	0,44				0,44	
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dinsosdaldukkbp3a	33.70				33.70	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya advokasi KIE pengendalian penduduk dan KB	Dinsosdaldukkbp3a	100%				100%	
	Advokasi Program KKBPk kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi program bangga kencana (pembangunan keluarga	Dinsosdaldukkbp3a	30 organisasi	176.850.000			30 organisasi	194.535.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

		kependudukan dan keluarga berencana) kepada steakholder dan mitra kerja							
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah dokumen promosi dan KIE program bangsa kencana (Pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana) melalui media masa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Dinsosdaldukkbp3a	3 dokumen	135.741.000			3 dokumen	149.315.000
	Pelaksanaan mekanisme oprasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (RAKORCAM) rapat koordinasi desa(RAKORDES) dan mini lokakarya(MINILOK)	Jumlah laporan mekanisme oprasional program bangsa kencana(pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana)	Dinsosdaldukkbp3a	6 laporan	243.000.000			6 laporan	267.300.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah laporan hasil pengelolaan oprsional sarana di balai penyuluhan bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan kelaurga berencana)	Dinsosdaldukkbp3a	1 laporan	612.000.000			1 laporan	982.080.000
	Pengendalian program KKBPK	Jumlah laporan hasil pengendalian program KKBPK	Dinsosdaldukkbp3a	2 laporan	0			2 laporan	88.000.000
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase tenaga penyuluh KB yang diperdayakan	Dinsosdaldukkbp3a	100				100	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader yang mengikuti penggerakan kader institusi masyarkat pedesaan (IMP)	Dinsosdaldukkbp3a	1808 orang	1.510.800.000			1808 orang	1661.880.000
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pendistribusian alat dan obat kontasepsi ke wilayah	Dinsosdaldukkbp3a	100%				100%	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jejaringan dan jejaringnya	Dinsosdaldukkbp3a	49 laporan	30.600.000			49 laporan	33.660.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah laporan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP.	Dinsosdaldukkbp3a	5 laporan	3.320.000			5 laporan	3.652..000
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah unit saranaPenunjang Pelayanan KB	Dinsosdaldukkbp3a	40 unit	2.739.120.000			40 unit	2.876.076.000
	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Dinsosdaldukkbp3a	4188 orang	4.557.818.000			4188 orang	5.013.600.000
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jejaring dan jejaringnya	Dinsosdaldukkbp3a	2 laporan	34.461.000			2 laporan	37.907.000
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need KB)	Dinsosdaldukkbp3a	9				9	

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program bangga kencana di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) di kampung KB	Dinsosdaldukkbp3a	36 kampung KB	267.300.000			36 kampung KB	312.099.000
	integrasi lintas sektoral dikampung KB	Jumlah Kampung KB yang terintegrasi	Dinsosdaldukkbp3a	36 kampung KB	0			36 kampung KB	4.125.000
	Penguatan Peran Serta Organisasi kemasyarakatan dan Mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan KB	Jumlah Rakor yang dilaksanakan	Dinsosdaldukkbp3a	6 Kali	12.676.000			6 Kali	13.944.000
Program Pengendalian Penduduk		Persentase kebijakan dokumen kebijakan pengendalian penduduk	Dinsosdaldukkbp3a	100				100	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase kebijakan yang mendukung pengendalian kuantitas penduduk	Dinsosdaldukkbp3a	100%				100%	
	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah laporan srasehan hasil pemutakhiran	Dinsosdaldukkbp3a	1 laporan	2.557.000			1 laporan	2.812.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

		Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah laporan rapat pengendalian program bangga kencana(pembangunan keluarga kendumukan dan keluarga berencana)	Dinsosdaldukkbp3a	4 laporan	5.976.000			4 laporan	6.573.000
		Implementasi Pendidikan kependudukan Jalur pendidikan Formal dan non formal	Jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan advokasi sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di datuan pendidikan jenjang sd.mi,sltp/mts jalur nonformal informal	Dinsosdaldukkbp3a	1 satuan pendidikan	6.225.000			1 satuan pendidikan	6.847.000
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan wilayah yang terpetakan dalam profil kependudukan dan KB	Dinsosdaldukkbp3a	100%				100%	
		Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen profil kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Dinsosdaldukkbp3a	30 dokumen	13.561.000			30 dokumen	14.917..000
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pelayanan sistem informasi keluarga	Dinsosdaldukkbp3a	18 laporan	65.343.000			18 laporan	71.877.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Dinsosdaldukkbp3a	1 dokumen	202.341.000			1 dokumen	222.205.000
	Pencatatan dan pengumpulan data Keluarga	Jumlah kader yang terfasilitasi	Dinsosdaldukkbp3	1808 kader	223.200.000			1808 kader	245.520.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih baik.

Penyusunan RENJA berpedoman pada RENSTRA DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga dan Mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, dan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga merupakan bagian yang utuh dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) DINSOSDALDUKKBP3A. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, tentang Pedomanan Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Rencana Kerja (RENJA).

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

Rumusan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel. 1.7 Rencana Kerja Dan Pendanaan

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026		
				Target Kinerja	Rp	Lokasi
Meningkatkan Perlindungan sosial bagi Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Meningkatkan Kualitas kelembagaan DINSOSDALDUKKBP3A		Cakupan PPKS yang mendapat program pemerintah	85.70		Dinsosdaldukkbp3a
	Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial		Nilai Sakip dinsosdaldukkbp3a	70.42		Dinsosdaldukkbp3a
			Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri	10		Dinsosdaldukkbp3a

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

			Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti				Dinsosdaldukkbp3a
			Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100			Dinsosdaldukkbp3a
			Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100			Dinsosdaldukkbp3a
			Persentase pengadaan barang milik daerah	100			Dinsosdaldukkbp3a
			Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100			Dinsosdaldukkbp3a
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan yang ASNnya terbayar tepat waktu	12 bulan			Dinsosdaldukkbp3a
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	97.614.000		Dinsosdaldukkbp3a

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12 dokumen	60.390.000	Dinsosdaldukkbp3a
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	35 Orang/bulan	4.856.213.000	Dinsosdaldukkbp3a
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan dan Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti	100%		Dinsosdaldukkbp3a
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	8.800.000	Dinsosdaldukkbp3a
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	3 Dokumen	6.600.000	Dinsosdaldukkbp3a
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Prosentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin dan Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya	100%		Dinsosdaldukkbp3a
Dinsosdaldukkbp3a					
Dinsosdaldukkbp3a					
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	4.000.000	Dinsosdaldukkbp3a
	Administarsi umum perangkat daerah	Jumlah administrasi umum penunjang operasional kantor	12 Bulan		Dinsosdaldukkbp3a

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	1.650.000	Dinsosdaldukkbp3a
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bagan logistik kantor yang disediakan	10 Paket	27.245.000	Dinsosdaldukkbp3a
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang di sediakan	12 Dokumen	880.000	Dinsosdaldukkbp3a
		Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	6.960.000	Dinsosdaldukkbp3a
		Dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektornik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik	12 Dokumen	3.960.000	Dinsosdaldukkbp3a
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	11.172.000	Dinsosdaldukkbp3a
		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya barang milik daerah	1 unit		Dinsosdaldukkbp3a
		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor yang disediakan	1 unit	40.000.000	Dinsosdaldukkbp3a
		Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase ketersediaan laporan daftar inventaris barang	100		Dinsosdaldukkbp3a
		Penatausahaan barang milik daerah pada SIPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 laporan	4.358.000	Dinsosdaldukkbp3a

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan kantor	12 bulan		Dinsosdaldukkbp3a
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	365.000	Dinsosdaldukkbp3a
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi. Suber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	213.244.000	Dinsosdaldukkbp3a
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	1.980.000	Dinsosdaldukkbp3a
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	822.386.000	Dinsosdaldukkbp3a
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan		Dinsosdaldukkbp3a
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang diplihara dan dibayarkan pajak perizinannya	89 unit	284.180.000	Dinsosdaldukkbp3a
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diplihara	10 unit	5.500.000	Dinsosdaldukkbp3a
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung KantordanBangunlainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	54.120.000	Dinsosdaldukkbp3a

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

			yang diplihara/direhabilitasi			
		Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan potensi sumber kesejahteraan sosial yang terlibat dalam penanganan masalah sosial	100%		Dinsosdaldukbp3a
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PSKS yang dibina	100%		Dinsosdaldukbp3a
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kab/kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kab/kota	18 orang	424.931.000	Dinsosdaldukbp3a
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kab/kota	292 lembaga	503.600.000	Dinsosdaldukbp3a
		Peningkatan Kemampuan Potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kab/kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kab/kota	1434 keluarga	7.996.000	Dinsosdaldukbp3a

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan sumber daya manusia dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) kewenangan kab/kota	Sertifikat	2.684.000	Dinsosdaldukkbp3a
Program Penanganan Bencana			Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	93.90		Dinsosdaldukkbp3a
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan korban bencana menerima bantuan	100%	19.461.000	Dinsosdaldukkbp3a
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kab/kota	49 orang	19.461.000	Dinsosdaldukkbp3a
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Cakupan kampung siaga	100%		Dinsosdaldukkbp3a
		Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	175 orang	11.412.000	Dinsosdaldukkbp3a

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

		Penyediaan makananan	Jumlah orang yang mendapatkan makananan 3x1 sehari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kab/kota	1000 orang	114.131.000	Dinsosdaldukkbp3a
		Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan	200 orang	34.239.000	Dinsosdaldukkbp3a
			Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota			Dinsosdaldukkbp3a
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP dan makam leluhur yang fasilitas pengelolaannya	100%		Dinsosdaldukkbp3a
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang dipelihara	100%		Dinsosdaldukkbp3a
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 makam	28.187.000	Dinsosdaldukkbp3a
		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 dokumen	110.000.000	
		Program Perlindungan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin mendapatkan penanganan sosial	85.87%		

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin cakupan daerah kab/kota	71.000 orang	78.422.000	
		Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.686 keluarga	2.456.371.000	
Program Rehabilitasi Sosial			Persentase penyandang	100%		Dinsosdaldukkbp3a
			disabilitas terlantar, anak			Dinsosdaldukkbp3a
			terlantar, lanjut usia terlantar,			Dinsosdaldukkbp3a
			gelandangan dan pengemis yang			Dinsosdaldukkbp3a
			terpenuhi kebutuhan dasarnya			Dinsosdaldukkbp3a
			diluar panti			Dinsosdaldukkbp3a
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial	Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%		Dinsosdaldukkbp3a

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

			Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 haun kewenangan kab/kota	60 orang	8.756.000	Dinsosdaldukkbp3a
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kab/kota	35 orang	50.000.000	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial kewenangan kab/kota	50 orang	7.157.106.000	Dinsosdaldukkbp3a
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar serta glandangan pengemis dan masyarakat kewenangan kab/kota	900 orang	92.870.000	Dinsosdaldukkbp3a
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan kab/kota	10 orang`	2.200.000	Dinsosdaldukkbp3a
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kab/kota	5 orang	2.200.000	Dinsosdaldukkbp3a

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

			Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kab/kota	10 orang	2.200.000	Dinsosdaldukkbp3a
			Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kab/kota	5 orang	2.200.000	Dinsosdaldukkbp3a
			Pemberian layanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kab/kota	10 orang	3.652.000	Dinsosdaldukkbp3a
				Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	70,32		Dinsosdaldukkbp3a
				Nilai Kabupaten Layak Anak	710		Dinsosdaldukkbp3a
Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tertanganinya Permasalahan Perempuan dan Anak						Dinsosdaldukkbp3a
							Dinsosdaldukkbp3a

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

			Cakupan OPD yang melaksanakan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG)	62.07		
			Cakupan korban kekerasan perempuan yang memperoleh pelayanan komprehensif	100		Dinsosdaldukkbp3a
			Cakupan korban kekerasan anak yang memperoleh pelayanan komprehensif	100		
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	30,1		Dinsosdaldukkbp3a
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelebagaan PHA yang difasilitasi	2 lembaga		Dinsosdaldukkbp3a
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemerintah non pemerintah dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non	1 organisasi	175.932.000	Dinsosdaldukkbp3a

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kab/kota	3 dokumen	10.406.000	Dinsosdaldukkbp3a
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup anak yang berkembang	2 lembaga		Dinsosdaldukkbp3a
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	3 dokumen	6.363.000	Dinsosdaldukkbp3a
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	9 dokumen	6.045.000	Dinsosdaldukkbp3a Dinsosdaldukkbp3a

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	1 dokumen	7.889.000	Dinsosdaldukkbp3a
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Legislatif dan perempuan sebagai pengambilan keputusan di OPD	0,61		
			Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan rumah tangga	30,35		
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kelembagaan PUG yang aktif di OPD	100%	12.961.000	Dinsosdaldukkbp3a
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) kewenangan kab/kota	2 dokumen	12.961.000	Dinsosdaldukkbp3a
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.	Cakupan organisasi wanita yang difasilitasi	100%		Dinsosdaldukkbp3a

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kab/kota	4 Dokumen	3.300.000	Dinsosdaldukkbp3a
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum	2 organisasi	216.616.000	Dinsosdaldukkbp3a
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina	100%	15.802.000	Dinsosdaldukkbp3a
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota yang mendapat peningkatan	200 orang	15.802.000	Dinsosdaldukkbp3a
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase data gender dan	100%		Dinsosdaldukkbp3a

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

			anak yang disediakan			Dinsosdaldukkbp3a
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Profil Gender dan Profil Anak	2 buku	4.747.000	Dinsosdaldukkbp3a
		Penyediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak	1 dokumen	4.747.000	
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak yang mendapatkan perlindungan khusus	22,5		Dinsosdaldukkbp3a
			Persentase anak yang menjadi korban kekerasan yang ditangani	100		Dinsosdaldukkbp3a
		Pencegahan Terhadap anak Yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat penurunan kekerasan terhadap anak	220		Dinsosdaldukkbp3a
		Advokasi dan pendampingan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan program/kegiatan pencegahan KTA	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi kebijakan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/kota	3 perangkat daerah	177.937.000	Dinsosdaldukkbp3a
		Penguatan kerjasama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak kecamatan layak anak desda/kelurahan layak anak dan DPPRA	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/kota	3 dokumen	2.750.000	Dinsosdaldukkbp3a

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	50 orang		Dinsosdaldukkbp3a
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan kab/kota	50 orang	5.847.000	Dinsosdaldukkbp3a
	Koordinasi pelaksanaan layanan AMPK	Jumlah dokumen hasil koordinasi yang dilaksanakan	20 dokumen	192.475.000	Dinsosdaldukkbp3a
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase lembaga penyedia layanan yang tersedia	100 %		Dinsosdaldukkbp3a
	Peningkatan Kapastias SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan peningkatan kapsitas yang dilaksanakan	5 kali	33.517.000	Dinsosdaldukkbp3a
	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	2,64		Dinsosdaldukkbp3a
	Pencegahan kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan thd perempuan yang tertangani	100%		Dinsosdaldukkbp3a

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota	3 perangkat daerah	7.128.000	Dinsosdaldukkbp3a
		Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan	2 dokumen	12.961.000	Dinsosdaldukkbp3a
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti	15		Dinsosdaldukkbp3a
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kab/kota yang mendapat layanan pengaduan	15 orang	51.425.000	Dinsosdaldukkbp3a
		Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan lingkup daerah kabupaten kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan penyediaan layanan	12 layanan	23.527.000	Dinsosdaldukkbp3a
		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase lembaga penyedia layanan yang tersedia	100 %		Dinsosdaldukkbp3a
		Peningkatan Kapastias SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan	5 kegiatan	42.405.000	Dinsosdaldukkbp3a

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

			bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota					
Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Meningkatnya Partisipasi keluarga berencana			Rata – Rata Angka Kelahiran Total / TFR,	2,03	Dinsosdaldukkbp3a		
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera		Cakupan keluarga yang mengikuti kelompok UPPKS	10.32	Dinsosdaldukkbp3a		
				Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB, BKR, BKL ber KB	83.77	Dinsosdaldukkbp3a		
							Dinsosdaldukkbp3a	
							Dinsosdaldukkbp3a	
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	100%		
			Promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja		Jumlah laporan hasil promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	8 laporan	24.310.000	Dinsosdaldukkbp3a
			Pemantauan data dan informasi Kelaurga berresiko stunting (termasuk remaja clon pengantin/Calon PUS,Ibu		Jumlah Data dan informasi keluarga beresiko stunting yang di himpun oleh Balai Penyuluhan KB	100	2.534.000.000	

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	hamil,Pasca persalinan/kelahiran,baduta/balita)				
	Pendampingan keluarga beresiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/Calon PUS,Ibu hamil,Pasca persalinan/kelahiran,baduta/balita)	Jumlah Tim Pendamping Keluarga yang ada di kab.purbaingga	2307	2.906.820.000	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga sejahtera	293		Dinsosdaldukkbp3a
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah laporan hasil orientasi dan pelatihan teknis pengelolaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi kelaurga/UPPKS)	3 laporan	10.358.000	Dinsosdaldukkbp3a
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL,BKRPPKS,PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah laporan hasil orientasi dan pelatihan teknis pengelolaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi kelaurga/UPPKS)	1 laporan	7.743.000	Dinsosdaldukkbp3a
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan	20 unit	165.000.000	Dinsosdaldukkbp3a

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

			ekonomi keluarga/UPPKS)			
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need KB)	0,44		Dinsosdaldukkbp3a
			Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	33.70		Dinsosdaldukkbp3a
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya advokasi KIE pengendalian penduduk dan KB	100%		Dinsosdaldukkbp3a
		Advokasi Program Bangga kencana kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi program bangga kencana (pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana) kepada stakeholder dan mitra kerja	30 organisasi	194.535.000	Dinsosdaldukkbp3a Dinsosdaldukkbp3a

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

		Promosi dan KIE Program Bangga kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah dokumen promosi dan KIE program bangga kencana (Pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana) melalui media masa cetak dan elektronik serta media luar ruang	3 dokumen	149.315.000
		Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah media promosi KIE yang digunakan	2 unit	209.674.000
		Pelaksanaan mekanisme oprasional program bangga kencana melalui rapat koordinasi kecamatan (RAKORCAM) rapat koordinasi desa(RAKORDES) dan mini lokakarya(MINILOK)	Jumlah laporan mekanisme oprasional program bangga kencana(pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana)	6 laporan	267.300.000
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan bangga kencana	Jumlah laporan hasil pengelolaan oprsional sarana di balai penyuluhan bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan kelaurga berencana)	1 laporan	673.200.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

		Pengendalian program KKBPK	Jumlah laporan hasil pengendalian program KKBPK	2 laporan	88.000.000	Dinsosdaldukkbp3a
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase tenaga penyuluh KB yang diperdayakan	100		Dinsosdaldukkbp3a
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader yang mengikuti penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	1808 orang	1.661.880.000	
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pendistribusian alat dan obat kontasepsi ke wilayah	100%		Dinsosdaldukkbp3a

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jejaringan dan jejaringnya	49 laporan	33.660.000	Dinsosdaldukkbp3a
			Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah laporan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP.	5 laporan	3.652.000	Dinsosdaldukkbp3a
			Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	4188 orang	5.013.600.000	Dinsosdaldukkbp3a
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jejaring dan jejaringnya	2 laporan	37.907.000	Dinsosdaldukkbp3a
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need KB)	9		Dinsosdaldukkbp3a
							Dinsosdaldukkbp3a

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) di kampung KB	36 kampung KB	294.030.000	Dinsosdaldukkbp3a
		Integrasi pembangunan lintas sektoral di kampung KB	Jumlah Kampung KB yang terintegrasi	36 Kampung KB	4.125.000	Dinsosdaldukkbp3a
		Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah mitra kerja yang mengikuti rakor persiapan penilaian bangga kencana	5 mitra	13.944.000	Dinsosdaldukkbp3a
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase kebijakan dokumen kebijakan pengendalian penduduk	100		Dinsosdaldukkbp3a
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase kebijakan yang mendukung pengendalian kuantitas penduduk	100%		Dinsosdaldukkbp3a
		Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah laporan srasehan hasil pemutakhiran	1 laporan	16.232.000	Dinsosdaldukkbp3a
		Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah laporan rapat pengendalian program bangga kencana(pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana)	4 laporan	6.573.000	Dinsosdaldukkbp3a

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

			Implementasi Pendidikan kependudukan Jalur pendidikan Formal dan non formal	Jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan advokasi sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di datuan pendidikan jenjang sd.mi,sltp/mts jalur nonformal informal	1 satuan pendidikan	6.847.000	Dinsosdaldukkbp3a
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan wilayah yang terpetakan dalam profil kependudukan dan KB	100%		Dinsosdaldukkbp3a
			Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen profil kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	30 dokumen	14.917.000	Dinsosdaldukkbp3a
		Dinsosdaldukkbp3a					
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pelayanan sistem informasi keluarga	18 laporan	71.877.000	Dinsosdaldukkbp3a
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	1 dokumen	222.575.000	Dinsosdaldukkbp3a
							Pencatatan dan pengumpulan data keluarga

BAB V

PENUTUP

Upaya mewujudkan kabupaten Purbalingga menjadi kabupaten maju di Indonesia wajib dilaksanakan oleh seluruh OPD Se-Kabupaten Purbalingga. Dalam rangka mengimplementasikan seluruh kewenangan bidang urusan sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka rencana kerja DINSOSDALDUKKBP3A Tahun 2026 telah disusun secara baik dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan dokumen rencana kerja tahun 2026 ini dapat dipedomani oleh seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rencana Kerja (Renja) DINSOSDALDUKKBP3A Tahun Anggaran 2026 merupakan sebuah gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan guna merealisasikan tujuan dan sasaran DINSOSDALDUKKBP3A dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Purbalingga, APBD Provinsi Jawa Tengah ataupun dari APBN.

Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan diharapkan bisa menutupi seluruh kebutuhan program pengawasan dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbaingga dan RKPD Provinsi Jawa Tengah yang disesuaikan juga dengan pagu anggaran yang diterima DINSOSDALDUKKBP3A.